MAKALAH DAN RUMUSAN HASIL DISKUSI PANEL UTAMA

Makalah Panel Utama

Panel utama seminar nasional yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI) ini adalah membahas tema utama seminar, yaitu "Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas SDM dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat." Makalah yang disajikan dalam panel utama ini dibagi ke dalam empat subtema, yaitu:

1. Pola Komunikasi Pembangunan dan Kebijakan Publik.
2. Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas SDM Pendamping Pengembangan Masyarakat.
3. Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan ICT mendukung Proses Pengembangan Masyarakat Global.
4. Peran Pengambil Kebijakan dalam Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan.

Jumlah makalah yang dipaparkan dalam panel utama seminar nasional ini adalah sebanyak empat makalah sesuai dengan jumlah subtema tersebut di atas. Penulis sekaligus pembicara dalam panel utama ini adalah para pakar yang memiliki kompetensi dari subtema seminar nasional tersebut. Judul makalah dan penulis sekaligus pembicara dari panel utama seminar nasional ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Pembangunan dengan Aksentuasi Komunikasi Politik, yang ditulis dan disampaikan oleh Bachtiar Aly (Ketua Dewan Guru Besar FISIP Universitas Indonesia).
2. Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat, yang ditulis dan disampaikan oleh Sjafri Mangkuprawira (Guru Besar Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB).
3. Paradigma Pendayagunaan Teknologi Informasi Menyongsong Masyarakat Global, yang ditulis dan disampaikan oleh Kudang Boro Seminar (Direktur Komunikasi dan Sistem Informasi IPB).
4. Peranan Pengambil Kebijakan dalam Pengembangan Masyarakat, yang ditulis dan disampaikan oleh Musa Hubeis (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen FEM IPB, Wing Rektorat Lt 3 IPB Dramaga; Ketua Program Industri Kecil Menengah, SPs IPB dan Ketua Lembaga Pendamping, LPPM IPB).

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DENGAN AKSENTUASI KOMUNIKASI POLITIK

Bachtiar Aly[1]

ABSTRACT

Communication development in globalization era is getting more and more important and significant since every party and the stakeholders have to work hand in hand in fair and honest way to achieve a better quality of social order. All parties and the stakeholders can optimize their part if they have intellectual vision, make good use of the information networking, and keep a good relation with everyone. Political communication approach demands the political elite and the community leader to care and commit themselve to the betterment of the nation. The main point is the communication development is airing at improving the life quality of everyone in every level of life.

Key words: *communication development, human resource development, political communication*

PENDAHULUAN

Konstelasi politik Indonesia sejak dicanangkan Reformasi adalah sangat dinamis dan kadangkala perkembangannya tidak dapat diprediksi. Kita telah memasuki era demokrasi yang pilarnya antara lain akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Semua lembaga kenegaraan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya memperlihatkan sikap keterbukaan yang jujur, fair dan jauh dari sikap kemunafikan. Di sisi lain proses demokratisasi telah memberikan peran masyarakat yang lebih aktif, masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan. Ia tidak lagi sebatas obyek tetapi subyek Demokrasi.

Hak-hak masyarakat harus diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menggunakan hak-hak warga negara dalam segala lini termasuk penggunaan hak politiknya. Ketika masyarakat masuk dalam proses demokrasi maka peran dan fungsi Partai Politik menjadi sangat relevan. Karena dalam sistem Kenegaraan yang mengedepankan demokrasi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Politik menempati posisi yang sangat strategis.

Tolok ukur suatu Negara dikategorikan demokrasi apabila ia antara lain memiliki Partai Politik, Serikat Buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media dan hadirnya kelompok-kelompok kepentingan Partai Politik berjuang untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan melalui wakil-wakilnya di Parlemen. Repotnya elit politik kita digugat rakyat karena dianggap tidak peka dan kurang peduli dengan nasib rakyat. Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa banyak sekali anggota Parlemen yang punya kepedulian

Elit politik kita digugat, ia dianggap kurang responsif, tidak bertanggung jawab atas kemelut politik yang terjadi, ia tidak peka terhadap penderitaan rakyat, asyik-masuk dengan diri nya sendiri. Perdebatan di tingkat Elit, sebutlah diskusi di lingkungan partai politik, pemerintahan dan parlementaria sering tidak membumi yang dibincangkan.

---

[1] Ketua Dewan Guru Besar FISIP Universitas Indonesia

Agenda reformasi di bidang politik, hukum/HAM, sosial budaya dan aspek strategis lainnya memang dibicarakan, dibahas tetapi suka luput dari realisasi yang masyarakat dambakan. Apa yang dipikirkan di benak elit politik kita kadangkala sulit dipahami oleh masyarakat, mereka merasa komunikasi politik elit kita seperti tidak terjangkau, mengalami distorsi bahkan terdapat kesenjangan. Carut-marut merebak dalam reportase di media massa kita mendramatisasi masalah, bahkan dianggap meruncingkan persoalan.

Apa yang salah dari komunikasi politik elit, sehingga perlu ditata ulang dengan pendekatan moralitas dan etika politik? Etika politik menjadi relevan sebagai rujukan dalam mengembangkan komunikasi politik yang sesuai dengan sistem nilai bangsa.

HAKIKAT KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi politik sudah seharusnya berlandaskan pada falsafah negara, sistem politik dan memperhitungkan etos dan dinamika bangsa yang hidup di tengah-tengah masyarakat primordial. Upaya elit untuk mempengaruhi masyarakat agar gagasan politik yang memiliki substansi ideologi, orientasi politik dan pemikiran yang diarahkan untuk mempengaruhi masyarakat pada suatu capaian dan prestasi tertentu dengan segala konsekuensi yang patut diperhitungkan, dapatlah disebut sebagai ruang Iingkup atau definisi komunikasi politik.

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik dari elit politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan-pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan seperti terjadinya proses pengambilan keputusan politik secara demokratis, transparan dan tanggung gugat (akuntabiLitas).

Prof. Dr. David Easton yang menggeluti masalah sistem politik mencermati komunikasi politik sebagai sejumlah atau seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas *social behavior* dengan caranya masing-masing mempengaruhi bahkan hendak menguasai masyarakat dengan gagasan yang mereka miliki. Sehingga aktivitas komunikasi politik mampu mengikat semua komponen bangsa dengan sanksi dan kompensasi yang disepakati bersama.

Komunikasi Politik menemukan formatnya pada suatu tahapan sistem politik yang relatif sudah mapan. EIit politik dalam menyampaikan gagasan politiknya agar "dituruti" oleh masyarakat tentu harus memperhatikan kondisi-kondisi obyektif, sistem nilai dan dinamika masyarakat dengan cara-cara persuasif, kooperatif dan bermoral. Ukuran tingkat keberhasilan dipergunakan indikator-indikator utama, yaitu: religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Kesembilan indikator utama ini haruslah menjadi acuan Komunikasi Politik Elit kita, baik yang berada di Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan para pengambil keputusan strategis seperti di partai politik.

Muatan normatif terdapat dalam etika dan visi bangsa sesungguhnya sudah ada atau pernah hidup ditengah-tengah masyarakat kita. Masalahnya ketika penyelenggara negara dan masyarakat tidak berdaya bereaksi atas sikap-tindak negara yang otoriter, maka reduplah nilai-nilai yang sudah eksis tersebut. Bahkan sistem nilai yang diaksep masyarakat terkesampingkan hanya demi atas nama "harmoni" (semu), stabilitas, kepentingan nasional, uniformitas dan formalitas

akomodatif. Kini ada suatu kebutuhan untuk mengaktualisasikan agar sistem nilai tersebut dapat "kembali" membumi, ditaati oleh semua warga negara dan menjadi pemandu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merajut kembali kebersamaan perlu suatu kajian cermat ketika pusat digugat oleh banyak daerah atas sikapnya yang tidak adil, semena-mena dan mengarah pada egosentris Jakarta. Hasrat untuk bersatu (Le desire d'etre ensemble, Renan) yang hingga kini diyakini sebagai perekat persatuan bangsa karena kesamaan bahasa, agama dan budaya bahkan pengalaman kesejarahan, kini sejak masa reformasi mendapat ujian sangat berat, disintegrasi nasional adalah taruhannya.

Otonomi Daerah merupakan jalan keluar bagi keterbelengguan daerah atas cengkraman pusat pada masa lalu. Konflik etnis, antar suku yang pada masa lalu dianggap sudah tidak bermasalah ternyata ia seperti api dalam sekam, sewaktu-waktu mendapat gesekan, ia meledak membakar dan memusnahkan kebanggaan kolektif.

Krisis kepercayaan yang melanda Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini menjadikan masyarakat bangsa patah arang dan kehilangan kepercayaan terhadap pengambilan keputusan. Korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadi penyakit menular yang laten. Situasi moneter merangkak buruk, rapuhnya sektor perbankan, suku bunga yang naik-turun seperti eskalator rusak menjadikan konsumen kehilangan pegangan.

Kecemburuan sosial tumbuh merebak, kesenjangan ekonomi menjadikan orang menempuh jalan pintas, potong kompas, menghalalkan segala cara (mental menerabas, Koentjaraningrat) terjadi erosi moral hampir di segala strata masyarakat dan kepemimpinan. Manifestasi dari keangkaramurkaan tersaji gamblang dan telanjang dalam bentuk aksi penjarahan, pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan dengan main bakar dan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan. Kita seakan kehilangan nurani dan akal sehat karena terjebak menjadi orang (pendendam, pembunuh, pemerkosa, pembakar, Taufik Ismail) yang mendegradasi martabat kemanusiaan.

Tidak dapat disangkal bahwa di tengah carut-marut politik yang dipicu oleh sebagian elit politik dan media massa yang memanfaatkan momentum ketidak stabilan dan konflik yang berkepanjangan, suatu terobosan lobi dari wakil-wakil rakyat kita merupakan kebutuhan yang mendesak.

Lobi merupakan suatu instrumen Komunikasi Politik yang ditujukan bagi upaya untuk memperlancar dan memuluskan gagasan/idea politik menjadi realita. Kemampuan lobi dari wakil-wakil rakyat di Parlemen bertujuan untuk meyakinkan mitra kerja dan kadangkala lawan politik agar mereka mau berunding, memahami posisi sesama dan mencapai kompromi atau konsensus. Oleh karena itu lobi bagi legislator sesuatu keterampilan yang tidak boleh kalah kiprahnya dengan para eksekutif manapun juga.

Lobi legislator ditantang untuk mampu menyelesaikan konflik yang merebak dari Sabang sampai Merauke. Wakil rakyat mengemban amanat untuk mampu meyakinkan pemerintah agar jangan sampai keliru dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan hajat hidup orang banyak.

Kini Indonesia memerlukan kepemimpinan yang tangguh dan solid untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan dan sangat meletihkan. Kalau demikian

halnya, kemampuan lobi termasuk kepiawaian dalam argumentasi dan bernegosiasi. Para Parlementaria sesungguhnya adalah mereka yang memiliki kemampuan dan otoritas meyakinkan mitra kerja dan lawan politik dengan mengoptimalkan keahlian sebagai negosiator, di samping keahlian-keahlian lainnya.

Adapun kriteria negosiator sebagai instrumen lobi adalah antara lain sebagai berikut : memiliki pengetahuan tentang topik/isu; mempunyai keterampilan analitis mengenai masalah sosial, ekonomi, politik, dan yang relevan; wawasan komunikasi; kemampuan persuasi; daya tahan (Ausdauer); mental dan fisik tangguh; kestabilan emosi; perilaku simpatik; memperjelas legitimasi; dan siap untuk kalah dan menang. Sedangkan dalam implementasi perlu diperhatikan antara lain pastikan ruang/waktu yang tepat, menciptakan kondisi kondusif, menganalisis kubu lawan, mengenal perbedaan posisi awal, mengupayakan menyamakan persepsi dan mencapai kesepakatan/*consensus*.

WAWASAN KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi politik sesungguhnya secara pendekatan keilmuan merupakan salah satu bentuk spesialisasi Ilmu Komunikasi. Dalam ranah ini tertua ilmunya adalah *Retorica* atau *Public Speaking.* Dalam tahapan berikutnya terdapat Jurnalistik, sebagai bagian dari media massa yang meliputi Radio, Televisi, Film dan Audio Visual lainnya dan bahkan kini teknologi *Cyber Space* seperti internet dikategorikan pula sebagai cakupan media massa. Di samping komunikasi politik ada pula Komunikasi Sosial, Komunikasi Antar Budaya, Komunikasi Dakwah dan Komunikasi Interpersonal serta spesialisasi komunikasi lainnya seperti *Advertising* dan *Broadcasting* yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi (IT).

Unsur-unsur komunikasi agar terciptanya suatu proses komunikasi supaya tercapainya tujuan atau efek komunikasi terdiri dari sumber (source), pesan (message), media (channel) dan penerima (receiver). Prof. Dr. David K. Berlo (1960) merumuskan formula komunikasi secara sederhana tapi mengena. Formulanya dikenal dengan singkatan SCMR, yaitu *Source* (pengirim), *Channel* (saluran – media), *Message* (pesan) dan *Receiver* (penerima).

Para ahli yang lain mengingatkan seperti Charles–Osgood, dan Melvin De Fleur jangan lupa pada umpan baliknya (feedback). Umpan balik ini atau efek yang ditimbulkan patut secara cermat diperhitungkan oleh kommunikator terutama yang berpredikat Elit Politik termasuk Anggota Parlemen di dalamnya.

Upaya elit untuk mempengaruhi masyarakat agar gagasan politik yang memiliki substansi ideologi, orientasi politik dan pemikiran yang diarahkan untuk mempengaruhi masyarakat pada suatu capaian dan prestasi tertentu dengan segala konsekuensi yang patut diperhitungkan, dapatlah disebut sebagai ruang Iingkup atau definisi komunikasi politik.

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik dari elit politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan-pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan seperti terjadinya proses pengambilan keputusan politik secara demokratis, transparan dan tanggung gugat (akuntabiIitas).

Prof.Dr.David Easton yang menggeluti masalah sistem politik mencermati komunikasi politik sebagai sejumlah atau seperangkat interaksi yang diabstraksikan

dari totalitas *social behavior* dengan caranya masing-masing menpengaruhi bahkan hendak menguasai masyarakat dengan gagasan yang mereka miliki. Sehingga aktivitas komunikasi politik mampu mengikat semua komponen bangsa dengan sanksi dan kompensasi yang disepakati bersama.

Definisi Komunikasi Politik yang sangat terkait dengan sistem politik di suatu negara dirumuskan oleh Prof.Meadow (1998), yaitu : *"political communication refers* to *any exchange of symbols or message that* to a *significant extent have been shaped by or messages for the political systems".*

Komunikasi Politik menemukan formatnya pada suatu tahapan sistem politik yang relatif sudah mapan. EIit politik dalam menyampaikan gagasan politiknya agar "dituruti" oleh masyarakat tentu harus memperhatikan kondisi-kondisi obyektif, sistem nilai dan dinamika masyarakat dengan cara-cara persuasif, kooperatif dan bermoral. Komunikasi Politik diibaratkan Prof.Alfian (1991) sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya, melainkan apa yang terkandung di dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup.

Komunikasi politik mempersambungkan semua bagian dari sistem politik, dan juga mempersambungkan masa kini dengan masa lalu. Kalau demikian halnya maka aktivitas komunikasi politik bersifat politik, memiliki konsekuensi politik dan bahkan kalau elit politik cakap mengemas dan mengkomunikasikannya secara pas dan proporsional maka ia akan mampu mempengaruhi perilaku politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konfigurasi kompleks dari sejumlah kaidah acuan hidup yang menuntun manusia dapat hidup secara bermartabat, bermoral dan berperilaku terpuji dapat dikategorikan sebagai etika manusia beradab.

Menata komunikasi politik haruslah dimulai dengan memperhatikan pokok-pokok Etika dalam Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/MPR/2001) yaitu elit politik kita harus "*mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleran, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.*"

Menarik mencermati Putusan MPR RI No. 8/MPR/2004 tentang Kode Etik yang masih selaras dengan kondisi politik dewasa ini yang belum optimal dilaksanakan. Setiap anggota Majelis wajib mematuhi etika antara lain butir b "*bersikap kesatria dalam segala ucapan dan tindakan*" dan butir 10 "*memberikan informasi yang benar tentang hal-hal yang patut diketahui oleh masyarakat*" serta butir 19 "*memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi rakyat.*"

Suatu *ideale Vorstellung* gambaran yang didambakan sebagai penuntun untuk mencapai cita-cita kehidupan atau hidup dalam keber"*ada*"an bersama (Zusammensein, Heidegger) hidup berdampingan untuk mencapai masa depan dengan cara-cara yang dirancang secara tertib, realistik dan memiliki prospektif, dapat disebut *vision.*

Etika dan visi bergandengan dengan dan bersanding untuk menunjukkan kemampuan manusia agar dapat hidup lebih berkelayakan, beradab sebagai refleksi eksistensi manusia yang merupakan mahkluk sosial untuk mengabdi kepada Sang Pencipta dan berperilaku terpuji dengan sesama. Sumber inspirasi bagi terciptanya etika dan visi dapat dirujuk dari ajaran / kaidah agama, nilai universal, nilai-nilai ke Indonesiaan (nasional atau konstitusi, adat istiadat, *local genius* kedaerahan) dan

untuk terlaksananya hal tersebut diperlukan faktor keteladanan, acuan imperatif dengan sanksi hukum dan pengawasan masyarakat.

PENGERTIAN DAN PRINSIP DASAR KOMUNIKASI

Setiap insan diberi kemampuan berkomunikasi menurut kodrat dan caranya masing-masing. Seseorang yang menyampaikan pikiran dan perasaannya disebut komunikator (communicator) yang mendengar dan meresponsnya disebut komunikan (communicant/audience) atau dapat dirinci sebagai pendengar, penonton/pemirsa atau khalayak.

Isi komunikasi disebut pesan (messages) sedangkan media yang digunakan merupakan instrumen penyaluran (channel). Hasil yang diharapkan agar tercapainya tujuan berkomunikasi disebut efek (effect) dengan selalu memperhitungkan gangguan (noise) yang mungkin muncul. Sehingga proses komunikasi ini menciptakan ”siapa”, ”mengatakan apa”, dengan ”saluran apa”, ”kepada siapa”, dan ”dengan akibat” dan ”hasil yang bagaimana.”

Ditilik dari komunikasi politik, aktornya meliputi berbagai pejabat politik yang berkedudukan di lembaga eksekutif, legislatif dan pejabat yudikatif. Banyak definisi komunikasi dari para ahli. Sebagai pakar komunikasi yang juga ahli politik Prof. Dr. Harold Lasswell merumuskan suatu model (1948) 5W yaitu *Who* (Siapa), *Say What* (mengatakan apa), *In Which Channel* (di media mana), *To Whom* (kepada siapa) dan *With What Effect?* (dengan efek/hasil apa?). Model ini dikenal sebagai Formula Lasswell.

Model 5W dalam jurnalistik berkembang menjadi 5W 1H yaitu tambahan *How* ? (bagaimana) yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Gail Boardman. Kalau ditelaah lebih mendalam, *Who* berarti komunikator (baca: bisa pejabat publik, anggota parlemen, menteri, gubernur, camat, dan lain-lain). Ia menjadi acuan informasi. *Say What* bermakna pesan atau isi informasi (baca: dapat berupa pesan dan pernyataan politik, komunike, protes, dan lain-lain). *In Which Channel* yaitu berupa saluran komunikasi atau media yang dipergunakan (baca: media cetak, media elektronik seperti radio, tv, telepon, dan lain-lain). *To Whom* berarti kepada siapa pesan itu ditujukan atau siapa penerima isi pesan itu ditujukan atau siapa penerima isi pesan komunikasi (baca: konstituen, masyarakat, pemangku kepentingan, dan lain-lain). Sedangkan *With What Effect*? berarti manfaat apa atau dampak apa saja yang ditimbulkan (baca: apakah sipenerima pesan/khalayak sudah paham, mengerti, setuju atau sebaliknya atau ia merasa tenang atau terhibur dan mau memahami).

Tahapan terjadinya komunikasi ini disebut pula dengan istilah proses komunikasi. Dalam model ini diperlukan suatu perencanaan yang baik. Dengan kata lain komunikator yang cerdas ia mampu menyampaikan pesan-pesan komunikasi politik dengan mempertimbangkan segala variabel sehingga mencapai sasaran dan tujuan berkomunikasi yang diharapkan. Artinya kita mampu memberi pemahaman dan secara tidak langsung mampu kita pengaruh dengan cara-cara persuasi.

Secara singkat Prof. Dr. Carl I. Hovland menyederhanakan definisi komunikasi sebagai suatu proses untuk mengubah perilaku orang lain (communication is process to modify the behavior of other individualism). Intinya proses komunikasi adalah kemampuan komunikator mentransformasikan simbol-

simbol berupa lambang, sinyal, kata-kata, pernyataan yang perlu dipahami oleh komunikan sehingga ia menuruti apa keinginan komunikan.

Adalah fungsi komunikasi yang memiliki visi masa depan ketika ada tuntutan untuk melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi penerus. Fungsi komunikasi menjembatani dan mempercepat proses pemindahan nilai-nilai dan norma-norma dari komunikator kapada khalayak dengan cara-cara yang seksama. Dari sisi lain dapat pula dinyatakan bahwa fungsi komunikasi adalah memberi informasi atau mengkomunikasikan (to inform), melakukan upaya pendidikan atau mendidik (to educate), melaksanakan upaya untuk menyenangkan publik atau menghibur (to entertain) dan fungsi yang teramat signifikan adalah secara sistimatis mencoba terus mempengaruhi (to influence) mitra bincang atau khalayak.

Dengan demikian kepada setiap dewan dituntut dan diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang andal (communication skill) dalam segala strata. Kalau kita kembali kepada analisis Harold Lasswell dalam *"the structure and function of communication in society*" (1948) maka terdapat tiga fungsi atau tujuan komunikasi. Yaitu, fungsi melakukan pengawasan (surveillance), fungsi menghubungkan berbagai komponen masyarakat (correlating of the component of society in making a response to the environment) dan melakukan upaya pelimpahan urusan sosial ("transmision of the social inheritance).

Dalam konteks ini menjadi relevan tugas-tugas mulia dari para ahli penyuluh dalam kaitan komunikasi Pembangunan. Bagaimana petugas di lapangan mampu menyerap aspirasi masyarakat mencoba melakukan klarifikasi dengan berbagai pihak sehingga keinginan masyarakat bukan saja tersalur tetapi tercapai apa yang mereka harapkan. Masyarakat menuntut adanya kesinambungan dari nilai-nilai atau hasil yang kini dimiliki untuk kepentingan masa depan penerusnya. Masyarakat perlu diajak untuk berpikir, merasakan dan menyadari hak dan kewajibannya. Para penyuluh komunikasi pembangunan menjadi motor dan mediator memperjuangkan hasrat dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan berkesinambungan.

Pengertian komunikasi menurut pakar senior komunikasi Prof. Dr. Wilbur Schramm adalah berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti umum (common) atau bersama. Berkomunikasi berarti menciptakan kebersamaan (commonnes) dengan berbagi informasi. Jadi, hakikat komunikasi sebenarnya adalah upaya memberi dan menerima pesan komunikasi untuk menciptakan saling pengertian.

Menurut pendapat Prof. Carl I. Hovland sesungguhnya komunikasi adalah suatu proses sistimatis untuk merubah perilaku orang lain (communication is process to modify the behaviour of other individualism). Oleh karena itu, tolok ukur modernitas utamanya bagi penggiat Komunikasi Pembangunan adalah ia harus memiliki visi intelektual (intelectual vision), jaringan informasi yang luas atau silaturahim (information networking) dan mempunyai kapasitas menjangkau masyarakat (acces to grassroot). Dalam konteks keindonesiaan bagaimana dengan komunikasi pembangunan masyarakat dapat hidup di alam demokrasi secara bermartabat, sejahtera dan berkeadilan. Semoga !

DAFTAR PUSTAKA

Aly B. 1984. Geschichte und Gegendwart der Kommunikationssysteme in Indonesien, Peter Lang, Frankfurt am Mainz, Zurich, New York.

Ardial. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Indeks.

Baran S. 2006. *Introduction to Mass Communication*. Boston: McGraw-Hill.

Berger/Chaffe. 1987. *Handbook of Communication Science*. Beverly Hills, California: Sage.

Bryant J, Thompson S. 2002. *Fundamental of Media Effect*. New York: McGraw-Hill.

Cutlip SM *et al.* 2005. *Effective Public Relations*. Jakarta: Gramedia.

DeFleur D. 1991. *Understanding Mass Communication*. Houghton, Mifflin.

McQuaill D, Windahl S. 1996. *Communication Models for the study of mass communications*. New York: Longman.

Nimmo D. 2000. *Komunikasi Politik: Khalayak dan E*fek. Bandung: Rosdakarya.

Rakhmat D. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.

Winarso HP. 2005. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Sjafri Mangkuprawira[2]

ABSTRACT

Indonesia welfare degree based on the Human Development Index figures show the community development process must conducted continuously. The most important elements in the successful achievement of community development in addition to elements of natural capital, technology, institutional, human capital is element of social capital such as mutual trust among community members, social empathy, social cohesion, social awareness, and collective cooperation. The strengthening of social capital needed include in practice, community development requires a facilitator who serves as an analyst issues, supervising the group, coach, innovator, and liaison. The principles of operation are (1) working group, (2) continuity, (3) self-reliance, (4) unity of target audiences, (5) growth of mutual trust, and (6) the principle of continuous learning. In order to contribute optimum technical assitant which is required the development of quality human resources through participatory training based on adult education and development assistance forum.

Key words: *community welfare, community development, social capital, technical assistant quality*

PENDAHULUAN

Pengembangan masyarakat di Indonesia sudah lama berlangsung. Apakah itu yang dilakukan oleh masyarakat sendiri ataukah yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuknya bisa berupa pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), peningkatan pendapatan, infrastruktur dan pengembangan organisasi-organisasi sosial ekonomi. Pendekatannya sangat bervariasi. Ada yang parsial dan ada yang integrasi dari beragam pendekatan seperti pengintegrasian pendekatan lokalita, perencanaan sosial, pendekatan wilayah ekonomi, pembangunan lokalita dan perencanaan aksi. Bergantung pada kondisi daerahnya maka strategi pendekatan pengembangan masyarakat pun akan beragam sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan.

Pada dasarnya tujuan pengembangan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat tidak pernah mengenal kata henti. Prosesnya berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini wajar karena salah satu ciri masyarakat adalah dinamis. Antara lain kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah ke arah kehidupan yang semakin lebih bermutu, Perkembangannya sangat ditentukan oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik individu dan kelompok masyarakat itu sendiri. Unsur intrinsik meliputi tingkat pendidikan dan wawasan individu yang makin meningkat. Sementara unsur ekstrinsik dapat berupa kebijakan pembangunan, akses pembangunan, turbulensi sosial ekonomi dan politik. Dua unsur itu akan memengaruhi setiap kegiatan pengembangan masyarakat.

Pelaksanaan program dan keberhasilan pengembangan masyarakat sangat ditentukan pula oleh derajat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah. Dalam prakteknya pendekatannya akan berbeda sesuai dengan spesifik daerah seperti daerah pesisir, pegunungan, daerah sekitar hutan, daerah perdesaan dan daerah perkotaan. Selain itu nilai-nilai masyarakat berupa modal sosial positif

[2] Guru Besar Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

berupa jejaring sosial, kepercayaan, timbal-balik dan kebersamaan diduga berpengaruh kuat terhadap keberhasilan pengembangan masyarakat. Sebaliknya nilai-nilai primordial, nepotisme, sindikat mafia pengadilan, makelar kasus, sebagai modal sosial negatif diduga akan merugikan masyarakat. Kerusuhan sosial di sebagian kecil daerah diduga karena kuatnya modal sosial negatif. Biaya sosial akibat dari nilai-nilai negatif tersebut tentu saja ditanggung masyarakat.

Masyarakat memiliki sifat yang multidimensi. Masing-masing dimensi akan saling berkait dan saling bergantung dalam suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang total. Di dalamnya ada kekayaan sosial berupa modal sosial dan modal manusia. Sejalan dengan perubahan dinamika sosial maka pendekatan pengembangan masyarakat pun akan multidimensi. Karena itu pertanyaannya apa strategi yang perlu diterapkan agar modal sosial positif dapat direvitalisasi sehingga tujuan pengembangan masyarakat dapat berhasil? Apakah untuk itu diperlukan tenaga pendamping? Apa dan bagaimana peran sumber daya manusia pendamping pengembangan masyarakat yang sebaiknya?

KONDISI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dari negara-negara yang diteliti oleh UNDP (United Nations Development Programme), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih berada pada urutan di atas 100. Sebelumnya pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0,697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0,677 pada tahun 1999. Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Malaysia (urutan 61/0,796), Thailand (urutan 73/0,778), Filipina (urutan 84/0,758) dan Vietnam (urutan 108/0,704).

Angka IPM Indonesia pada tahun 2006 mengalami kemajuan dengan mencapai 0,711 dan berada diurutan 108, mengalahkan Vietnam yang mempunyai nilai 0,709. Kecenderungan dari angka IPM Indonesia adalah terus-menerus naik (0,677 pada 1999; 0,697 pada 2005 dan 0,711 pada 2006) dan semakin mempersempit ketinggalannya dibanding negara-negara lain. Posisi ini sekaligus mensyaratkan Indonesia berada pada level menengah IPM di dunia bersama negara tetangga seperti Thailand (74), Filipina (84), Vietnam (109) dan Timor Leste (142). Capaian tersebut berbeda dengan tetangga yang lain seperti Singapura (25), Brunei (34) dan Malaysia (61), yang masuk pada kategori negara dengan IPM level tinggi. Sudah bisa dipastikan Negara-negara yang mempunyai capaian IPM tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang sedang maupun rendah.

Pada tahun 2007 angka IPM Indonesia mengalami kenaikan menjadi 0,728, laporan ini dikeluarkan oleh UNDP pada 27 November 2007, Indonesia berada pada peringkat 108 sedunia dan masih di bawah Vietnam. Penilaian tersebut diantaranya usia harapan hidup menempatkan Indonesia pada posisi ke-100. Tingkat pemahaman aksara dewasa di urutan 56. Tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi ada di urutan 110. Sedangkan untuk pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita berada di posisi 113. Bagaimana dengan kondisi pengangguran, kemiskinan dan pendidikan masyarakat?

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, BPS 2008) yang dilakukan pada bulan Februari 2008, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai sekitar sembilan juta orang atau sekitar delapan persen dari keseluruhan

jumlah angkatan kerja. Dari jumlah pengangguran sekitar sembilan juta tersebut, pengangguran pria mencapai sekitar lima juta orang, sementara pengangguran wanita sebanyak empat juta orang. Jumlah penduduk Indonesia sendiri sampai saat ini tercatat sebanyak 228 juta orang, dengan jumlah angkatan kerja sekitar 112 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 62 persen diantaranya adalah kaum pria dan 38 persen kaum wanita.

Jumlah pengangguran dilihat dari segi pendidikan didominasi oleh mereka yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD, lulusan SD dan SMP yang mencapai sekitar 50 persen. Jumlah pengangguran lulusan SMP ke bawah mencapai 4,92 juta orang, lulusan SMA sebanyak 3,3 juta orang atau sebesar 40 persen, sedangkan sisanya lulusan diploma dan sarjana sekitar 10 persen dengan jumlah 1,14 juta orang. Sementara itu jumlah pengangguran di kota ternyata lebih tinggi dari desa dengan perbandingan 5,62 juta orang dan 4,39 juta orang. Selain itu, jumlah pengangguran di kota justru didominasi oleh lulusan SMA sebesar 35,74 persen, disusul lulusan SLTP sebesar 23,01 persen dan terakhir lulusan universitas sebanyak 6,68 persen.

Sementara itu hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2008 lalu, jumlah orang miskin mencapai 34,96 juta atau 15 persen dari total penduduk Indonesia. Atau, turun 2,21 juta jiwa ketimbang tahun 2007 yang tercatat ada 37,17 juta warga miskin di Tanah Air. Dari data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2007, 63,52 persen penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan. Bagaimana dengan tingkat pendidikan?

Warga buta aksara mencapai 18,1 juta orang dan sekitar 4,35 juta diantaranya tergolong usia produktif (15-44 tahun). Di atas 44 tahun terdapat 13,4 juta orang. Tragisnya dari semua yang buta aksara tersebut sebanyak 70 persen adalah perempuan (BPS & DepDiknas 2007). Menurut hasil Studi Political and Economical Risk Consultancy (PERC) tahun 2005, mencerminkan betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Derajat pendidikan di Indonesia di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia berada pada posisi paling buncit. Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan Filipina, berada di atas Indonesia. Tujuh belas indikator yang digunakan oleh PERC terdiri dari: impresi keseluruhan tentang sistem pendidikan di suatu negara; proporsi penduduk yang memiliki pendidikan dasar; proporsi penduduk yang memiliki pendidikan menengah; proporsi peduduk yang memiliki pendidikan perguruan tinggi; jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja produktif; ketersediaan tenaga kerja produktif berkualitas tinggi; jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja; ketersediaan staf manajemen; tingkat ketrampilan tenaga kerja; semangat kerja (work ethic) tenaga kerja; kemampuan berbahasa Inggris; kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris; kemampuan penggunaan teknologi tinggi; tingkat keaktifan tenaga kerja; frekuensi perpindahan atau pergantian tenaga kerja (labor turnover).

Gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat yang rendah di atas membuktikan bahwa pengembangan masyarakat harus berjalan bersinambung. Alasan lainnya adalah perkembangan dinamika sosial masyarakat tidak pernah berhenti. Mutu sumber daya manusia pun terus berubah. Begitu juga tentang sistem nilai-nilai sosial lokal bisa saja berubah sejalan dengan perubahan eksternal. Sebagai misal semakin mutakhirnya teknologi komunikasi, teknologi produksi, infrastruktur, perdagangan global akan berimbas pada tataran sistem sosial yang ada.

PENTINGNYA MODAL SOSIAL BAGI PEMBANGUNAN

Modal Sosial dan Pengembangan Masyarakat

Modal sosial merupakan konsep sosiologi yang digunakan dalam beragam ilmu seperti bisnis, ekonomika, perilaku organisasi, politik, kesehatan masyarakat dan ilmu-ilmu sosial. Semua itu untuk menggambarkan adanya hubungan di dalam dan antarjejaring sosial (wikipedia). Jejaring itu memiliki nilai. Seperti halnya modal fisik atau modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan kelompok maka modal sosial pun demikian pula. Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Dia mendefinisikan modal sosial sebagai *"the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition."*

Sementara itu James Coleman (1988) berpendapat modal sosial secara fungsi adalah sebagai *"a variety of entities with two elements in common: they all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors...within the structure."* Dia mengatakan bahwa modal sosial memfasilitasi kegiatan individu dan kelompok yang dikembangkan oleh jaringan hubungan, timbal balik, kepercayaan dan norma sosial. Modal sosial, menurut pandangannya, merupakan sumber daya yang netral yang memfasilitasi setiap kegiatan dimana masyarakat bisa menjadi lebih baik dan bergantung pada pemanfaatan modal sosial oleh setiap individu.

Menurut Robert Putnam (2006), modal sosial sebagai"the collective value of all 'social networks' and the inclinations that arise from these networks to do things for each other." Dia percaya modal sosial dapat diukur dari besarnya kepercayaan dan timbal-balik dalam suatu masyarakat atau di antara individu-individu. Selain itu konsep modal sosial memiliki pendekatan yang lebih pada unsur individual. Investasi dalam hubungan sosial dikaitkan dengan harapan diperolehnya profit dari pasar.

Bagaimana hubungan modal sosial dengan pembangunan atau pengembangan masyarakat? Dalam bukunya "Social Capital and Development: The Coming Agenda," Francis Fukuyuma (1996) mengatakan modal sosial adalah sebagai prakondisi untuk keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini undang-undang dan pranata politik menjadi hal pokok dalam membangun modal sosial. Alasannya modal sosial yang kuat menjadi syarat pokok dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan politik yang kuat. Fukuyama mengupas pentingnya modal sosial berbasis pada kepercayaan. Dalam keseharian, masyarakat berinteraksi dengan modal sosial yang kuat yang ditunjukkan dengan suasana saling percaya antarwarga. Bentuk modal inilah yang memiliki hubungan erat dengan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat atau bangsa.

Ada empat nilai yang sangat erat kaitannya dengan definisi yang dikemukakan oleh Fukuyama (Schwartz 1994 *dalam* Ancok 2007), yakni: *universalism* nilai tentang pemahaman terhadap orang lain, apresiasi, toleransi serta proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan tuhan lainnya lain; *benevolence* nilai tentang nilai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain*; tradition* nilai yang mengandung penghargaan, komitmen dan penerimaan terhadap tradisi

dan gagasan budaya tradisional; *conformity* nilai yang terkait dengan pengekangan diri terhadap dorongan dan tindakan yang merugikan orang lain, serta *security* nilai yang mengandung keselamatan, keharmonisan, kestabilan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain dan memperlakukan diri sendiri. Modal sosial pada dasarnya bersumber dari rasa percaya (trust) pada setiap pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.

Pendapat yang agak mirip dengan Fukuyama tentang definisi dan manfaat modal sosial adalah menurut Barbier (2000) dan Faucheux & O'Connor (2001), *dalam* Ancok (2007). Mereka mengatakan bahwa modal sosial berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena beragam alasan berikut: (a) Arus informasi akan lebih cepat bergerak antar agen ekonomi jika modal sosial cukup baik; (b) Kepercayaan sebagai komponen utama modal sosial positif akan mengurangi biaya pencarian informasi sehingga mengurangi biaya transaksi; (c) Modal sosial positif akan mengurangi kontrol pemerintah sehingga pertukaran ekonomi lebih efisien.

Masih menurut mereka, di sisi lain, modal sosial juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *natural capital* dengan cara: (a) Mengurangi eksternalitas negatif, karena dengan adanya modal sosial setiap agen ekonomi harus berpikir dalam melakukan aktivitas yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pihak lain; (b) Mengurangi tingkat *discount rate* yang tinggi, karena *social capital* yang baik akan memungkinkan pembagian resiko sehingga ketidakamanan individu (individu insecurity) dapat dikurangi; (c) Memerkecil kemungkinan resiko yang ditimbulkan oleh sifat *common property* sumber daya alam karena modal sosial yang kuat akan mengurangi runtuhnya sistem pengelolaan sumber daya alam yang buruk.

Dalam pengembangan masyarakat peran modal sosial sangat penting, karena di dalamnya menyangkut transformasi sosial. Transformasi sosial di sini terkait dengan pola pikir dan sikap hidup. Pada awal pembentukkan pengembangan masyarakat transformasi ide dan gagasan dari pendamping merupakan hal yang wajib dilakukan agar program dapat dilakukan dengan keyakinan yang tinggi. Dengan demikian ide yang dimaksud dapat terlaksana dengan baik. Pengembangan masyarakat dapat memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Selain mentransformasi ide, dalam komunitas tersebut program pengembangan masyarakat harus dapat mengubah sistem nilai dan perilaku dari khalayak sasaran. Perubahan sistem nilai dan perilaku inipun erat kaitannya dengan konsep modal sosial yang dikemukakan di atas. Dengan adanya modal sosial, maka program pengembangan masyarakat akan dapat memperkenalkan sistem nilai dan perilaku yang bersifat positif di masyarakat lewat kontrak sosial. Dalam prakteknya pengembangan masyarakat melibatkan peran individu di dalam masyarakat. Individu yang mempunyai sifat kepribadian yang terkait erat dengan modal sosial merupakan komponen dari CD yang cukup efektif nantinya. Di tingkat dunia, modal sosial pun menjadi isu penting, karena menjadi satu konsep strategis tentang persoalan kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia modal sosial terdapat di berbagai daerah. Sistem kekerabatan antarindividu dan kelompok, tolong-menolong secara timbal balik, empati sosial, gotong-royong, penghimpunan dana bencana, saling percaya antarindividu, kebersamaan, kohesi sosial, semuanya merupakan contoh-contoh modal sosial yang ada di Indonesia. Di samping modal sosial positif, di dalam

masyarakat ada yang dikenal modal sosial negatif seperti primordialisme, individualisme sempit, nepotisme dan mafia tindakan ilegal. Semua itu dapat menimbulkan eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat.

Ciri pengembangan masyarakat sebagai proses adalah terjadinya pertumbuhan, atau perkembangan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tanpa terjadinya eksternalitas negatif. Sebagai modal sosial yang memerkuat pengembangan masyarakat adalah adanya perekat integritas kelompok manusia yang terikat pada interaksi sosial. Disitu ada rasa kebersaman dan kepentingan bersama, saling menghormati hak dan tanggung jawab. Selain itu ada ketaatan dalam satu identitas tertentu, taat pada norma-norma kebersamaan dan menghormati hak dan tanggung jawab.

Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat merupakan salah satu model pendekatan pembangunan dengan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Selain itu dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan sisi kearifan lokal dimana masyarakat punya tradisi, dan adat-istiadat sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial. Berikut Gambar 1 dan 2 secara hipotetis menunjukkan hubungan modal positif dan negatif dengan kesejahteraan masyarakat.

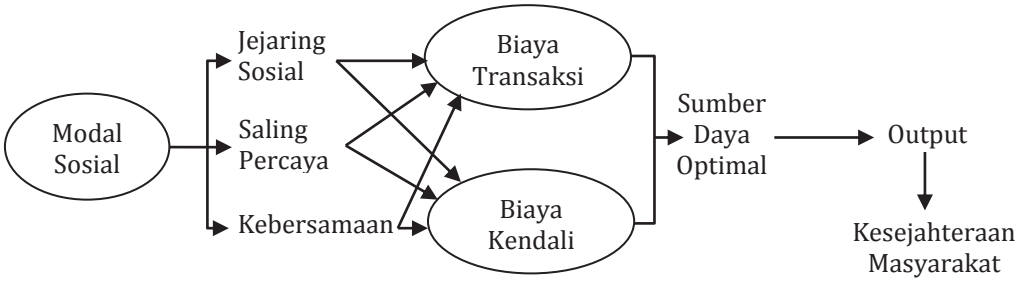

Gambar 1 Hubungan modal sosial positif dengan kesejahteraan masyarakat

Gambar 1 menunjukkan bahwa modal sosial yang positif akan memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai oleh jejaring sosial yang luas, tingginya saling percaya sesama anggota masyarakat, dan jiwa kebersamaan yang tinggi. Modal sosial ini akan memerkecil biaya transaksi dan biaya kendali untuk suatu kegiatan pengembangan masyarakat. Dengan kata lain akan mampu menciptakan pengelolaan sumber daya optimum dan kemudian menghasilkan output yang semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan Gambar 1, maka Gambar 2 memperlihatkan bahwa modal sosial yang negatif akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya saling percaya sesama warga yang menyebabkan perangkat kendali semakin berlapis. Hal ini berkait dengan meningkatnya perilaku kepentingan diri dan menurunnya sifat saling memberi. Mengapa? Karena timbulnya saling curiga dan antipasti. Akibatnya masyarakat mengalami stagnasi yang dicirikan oleh rendahnya kreativitas dan inovasi yang ditemukan. Dalam situasi seperti itu berarti terjadi pemborosan sumber daya dan pada gilirannya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

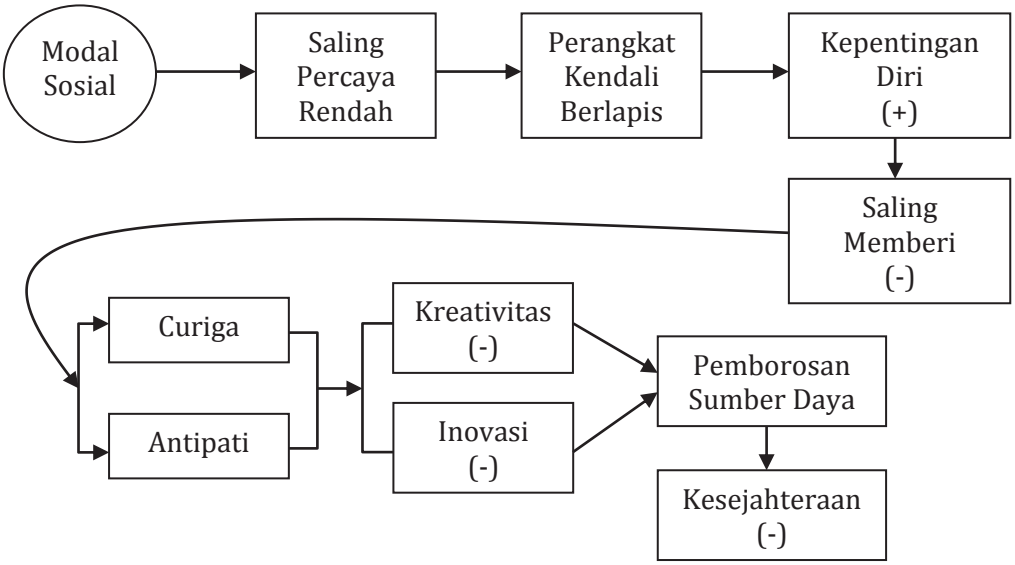

Gambar 2 Hubungan modal sosial negatif dengan kesejahteraan masyarakat

Penguatan Modal Sosial

Modal sosial positif adalah syarat utama bagi keberhasilan pengembangan masyarakat. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial semakin meningkatkan volume dan mutu proses dan hasil pengembangan masyarakat. Ukuran outputnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dalam hal ini modal sosial sangat berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari adanya kepercayaan sebagai modal utama antara lain dalam membangun sifat-sifat atau nilai-nilai kohesi sosial, kebersamaan, toleransi dan empati. Fungsi-fungsi kontrol dalam pengembangan masyarakat relatif longgar karena adanya saling percaya sesama individu.

Dalam kenyataannya modal sosial tidaklah statis. Tidak mudah dihindari perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi cenderung dapat menimbulkan deviasi modal sosial. Timbul perkembangan persepsi tiap individu terhadap hal-hal baru; apakah sebagai ancaman atau justru memperkuat modal sosial yang ada. Selain itu ketika masyarakat sudah semakin memiliki hubungan dengan pihak luar maka dibutuhkan fungsi kendali sosial terhadap setiap norma dan kebudayaan luar yang masuk. Pertanyaannya apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh entitas sosial agar dapat membentengi tantangan bahkan ancaman luar.

Melemahnya modal sosial positif bisa jadi karena diintervensi oleh modal sosial negatif. Kalau masyarakat tidak mampu mengatasinya maka bakal terjadi penggerusan modal sosial positif yang ada; misalnya gangguan terhadap interaksi sosial, saling percaya yang menurun, pelanggaran norma sosial, krisis kepemimpinan dan akhirnya kerenggangan hubungan sosial. Meningkatnya semangat nilai-nilai budaya konsumerisme dan individualistik, misalnya, akan

mudah menimbulkan konflik dan perilaku menyimpang. Perilaku yang tidak jarang ditemukan, misalnya primodialisme dan sentimen kedaerahan dan kesukuan bisa jadi dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Begitu pula yang menyangkut sindikat dan mafia kegiatan ilegal dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Hal itu semakin parah karena lemahnya fungsi kontrol sosial dan intensitas komunikasi yang rendah. Lama kelamaan terjadi krisis kepercayaan terhadap institusi sosial lokal.

Untuk memerkuat modal sosial positif dan memerkecil terjadinya modal sosial negatif maka beberapa pendekatan bisa dikembangkan yang meliputi beberapa hal yakni:

1) Pendidikan agama sebagai sumber pengembangan nilai-nilai luhur untuk membangun sifat kebersamaan dan saling percaya sesama manusia. Termasuk untuk meningkatkan kesadaran lingkungan lestari. Namun demikian pendekatannya tidak sebatas perkembangan kognitif namun seharusnya pada pengembangan sikap atau afektif.
2) Pendidikan sosialisasi keluarga. Sebagai sistem sosial terkecil seharusnya keluarga menjadi basis utama dalam menanamkan nilai moral kehidupan. Di sini peran kepala keluarga menjadi sangat sentral dalam memberi teladan berperilaku yang baik.
3) Pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial. Proses pembelajaran keahlian bekerjasama, norma hubungan timbal-balik dan tindakan kolektif perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Selain itu institusi diharapkan mampu mengembangkan solidaritas sosial dalam menghadapi situasi apapun.
4) Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang ada dalam modal sosial khususnya yang menyangkut pendidikan karakter perlu ditingkatkan mulai dari kalangan generasi dini baik lewat pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan kerjasama tim.
5) Pengembangan komunikasi informasi lewat beragam media dan saluran seni budaya diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai luhur dari kearifan lokal, kerjasama, saling percaya dan tanggung jawab.
6) Nilai-nilai dari luar tidak harus dihambat masuk sejauh memiliki hal-hal yang dianggap positif dan bahkan memperkuat modal sosial yang sudah ada. Asalkan dilakukan penyaringan secara selektif oleh institusi sosial dan khalayak luas.

MUTU PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pendekatan Konseptual

Pendampingan oleh seseorang dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat bukanlah barang baru. Dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat, pendamping harus memiliki mutu sumber daya manusia yang tinggi. Tidak mungkin tanpa menggunakan modal manusia yang bermutu, kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Begitu pula diperlukan modal sosial untuk memercepat proses dan mutu hasil pengembangan masyarakat. Kedua sumber daya tersebut memiliki keunikan masing-masing. Perbedaan kedua faktor tersebut dapat dilihat dari sisi fokus, ukuran, *outcome*, dan model seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Perbedaan modal manusia dan modal sosial

Fokus	Modal manusia Perorangan	Modal sosial Hubungan
Pengukuran	Lamanya sekolah Kualifikasi	Sikap/nilai-nilai Keanggotaan/partisipasi Tingkat kepercayaan
Outcome	Langsung: *income*, produktivitas Tak langsung: kesehatan, kegiatan sosial	Kohesi sosial Ekonomi Lebih pada modal sosial
Model	*Linear*	Interaktif/sirkular

Fokus modal (sumber daya) manusia dalam pengembangan masyarakat terletak pada potensi perorangan di suatu masyarakat; misalnya dalam hal mutu sumber daya manusia. Sementara sebagai modal sosial suatu masyarakat, fokusnya terletak pada hubungannya dengan jejaring sosial yang dibentuk khalayak. Basisnya adalah saling percaya di antara individu. Hal ini menjadi modal dalam membangun kerjasama dan solidaritas.

Pengukuran modal manusia jauh lebih mudah ketimbang modal sosial. Ukuran dari modal manusia bisa dilihat dari lamanya sekolah dan kualifikasinya. Termasuk dapat diukur kinerjanya yang merupakan fungsi dari mutu sumber daya manusianya. Sementara ukuran modal sosial dilihat dari gambaran abstrak tentang sikap (nilai), partisipasi dan kepercayaan. Sering dilihat dari gambaran sejauh mana modal sosial, misalnya kekuatan jejaring sosial ekonomi mampu mengembangkan program pengembangan masyarakat.

Output dari pengembangan masyarakat ditinjau dari modal manusia adalah pendapatan dan produktivitas; dan tak langsung berupa kesehatan dan kegiatan sosial. Namun modal sosial pun bias berdampak pada ekonomi. Misalnya kohesi sosial akan mampu memperkuat jejaring sosial sehingga dapat memperlancar usaha-usaha ekonomi bisnis. Begitu pula pelatihan dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja namun juga bisa meningkatkan kemampuan seseorang dalam membangun jejaring sosial.

Modal manusia sangat terkait dengan keberhasilan investasi. Secara langsung pengaruhnya dapat dilihat dalam meningkatkan pendapatan bisnis. Sementara modal sosial tidak mudah melihat dampaknya terhadap pengembangan masyarakat. Yang lebih menonjol adalah terjadinya proses interaktif antarkomponen masyarakat secara sirkular. Pengaruhnya adalah dalam memperkuat elemen modal sosial yang ada.

Dari sudut konsep, definisi tentang mutu dapat diawali dari identifikasi dan pensolusian masalah atau akar persoalan yang sebenarnya. Menurut Juran (1995), dalam konteks produk, mutu diartikan sebagai ketepatan untuk dipakai dan tekanan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Agak berbeda dengan Juran, Crosby *dalam* Juran (1995), lebih menekankan pada transformasi budaya mutu. Pendekatannya merupakan proses arus atas-bawah yaitu menekankan kesesuaian individu terhadap perkembangan persyaratan atau tuntutan masyarakat. Sementara itu, Deming, *dalam* Juran (1995), lebih menekankan pada kondisi faktual empiris

dan cenderung berorientasi pada arus bawah-atas, yaitu mutu dapat dikembangkan jika didukung oleh SDM yang bermutu.

Meski tidak ada satu pun definisi yang diterima secara universal, namun ada unsur kesamaannya yaitu:

(1) Mutu ditinjau dari sisi proses sebagai upaya memenuhi atau melebihi harapan khalayak. Dalam hal ini termasuk mutu pendamping dalam melayani khalayak.
(2) Mutu tidak saja mencakup aspek proses, hasil pelayanan dan lingkungan tetapi juga aspek mutu SDM.
(3) Mutu SDM meliputi mutu potensi diri, mutu proses dan mutu kinerja: *Mutu potensi diri* antara lain tingkat pengetahuan, etos kerja, sikap, keterampilan, kesehatan, kedisiplinan, loyalitas kerja dan kejujuran; *Mutu proses* antara lain dilihat dari komitmen, tingkat kepuasan pendampingan, tingkat keamanan kerja pribadi dan mutu kehidupan kerja karyawan; *Mutu kinerja* dilihat dari output antara lain berupa kepuasan khalayak dan mutu hasil pendampingan.
(4) Seorang pendamping memiliki mutu tertentu apabila sesuai dengan standar mutu dan kompetensi yang telah ditentukan oleh proyek pendampingan. Dengan kata lain, mutu diartikan sebagai adanya kesesuaian dengan kebutuhan khalayak.
(5) Mutu memiliki karakteristik kondisi yang dinamis sejalan dengan perubahan pasar kerja, teknologi, waktu dan dinamika sosial masyarakat (persepsi), misalnya kebutuhan akan mutu SDM pendamping tentang motivasi, pendidikan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan kesehatan fisik.

Ciri-ciri mutu SDM pendamping, misalnya dalam proses pengembangan produksi, dapat dilihat dari berbagai prespektif yakni input, proses dan output: Input mutu SDM yang tersedia (perspektif pertama) sangat menentukan mutu SDM pada kegiatan proses (perspektif kedua); Dua perspektif pertama dan kedua (input dan proses) sangat menentukan keberhasilan produktivitas kerja. Berikut disajikan suatu ilustrasi tentang bagaimana tingkat pendidikan dan pengetahuan pendamping tertentu mampu melahirkan daya prakarsa, kreativitas dan inovatif di dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga potensi nyata ini mempengaruhi produktivitas kerjanya (Gambar 3). Dari gambar ini dapat dikatakan bahwa potensi awal pendamping yang masih bersifat potensial (pasif) menjadi unsur riil ketika dimanfaatkan dalam suatu proses pendampingan, dengan dukungan faktor lain. Unsur riil inilah yang merupakan input berikutnya yang mampu menciptakan suatu produktivitas kerja, *ceteris paribus*.

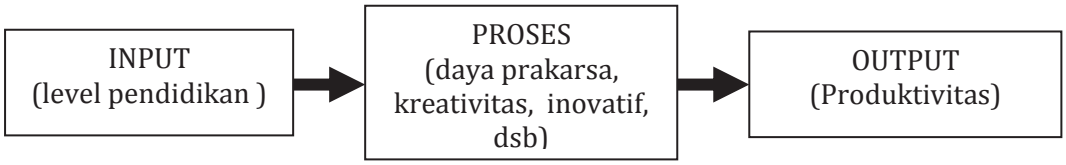

Gambar 3 Contoh rangkaian mutu input (SDM), proses dan output
Sumber: Mangkuprawira dan Hubeis 2007

(1) Input, mencakup unsur:

a. Tingkat pendidikan dan pengetahuan (kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual).
b. Sikap atas pekerjaan, produktivitas sebagai sistem nilai, etos kerja, persepsi, motivasi dan sikap akan tantangan.
c. Tingkat keterampilan manajerial dan operasional, kemampuan berkomunikasi dan termasuk kepemimpinan.
d. Daya inisiatif, kreativitas dan inovatif.
e. Kepemimpinan manajerial, teknis-mutu dan kelompok.
f. Tingkat pengalaman kerja.
g. Tingkat kedisiplinan.
h. Tingkat kejujuran.
i. Tingkat kesehatan fisik dan mental kejiwaan.

(2) Proses, mencakup unsur:
a. Kerjasama secara harmonis sesama rekan pendamping dan manajer pendampingan.
b. Bekerja dalam sistem yang total.
c. Perubahan (peningkatan dan pengurangan) motivasi kerja.
d. Kejadian konflik horizontal dan vertikal.
e. Frekuensi daya prakarsa, kreativitas dan inovatif.
f. Frekuensi dan ketepatan waktu kehadiran kerja.
g. Tingkat keselamatan dan keamanan kerja individu.
h. Tingkat kesehatan kerja.
i. Tingkat kerusakan mutu produksi.
j. Tingkat efisiensi kerja.
k. Tingkat komitmen kerja.

(3) Output, mencakup unsur:
a. Pencapaian standar produktivitas kerja.
b. Pencapaian standar kinerja organisasi (nilai manfaat),
c. Pencapaian target penyelesaian kerja.
d. Kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Program

Berdasarkan pengalaman lapangan, peran sumber daya manusia pendamping sangat penting. Dia merupakan pemeran kunci dengan tugas utama mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengorganisasi diri, kepemimpinan andal, dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pertimbangannya adalah perkembangan kebutuhan khalayak dan unsur eksternal yang senantiasa berubah. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki pendamping dalam menjalankan tugasnya meliputi (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya dan (6) prinsip pembelajaran bersinambung. Sehubungan dengan itu pada dasarnya pendamping sebagai fasilitator pengembangan masyarakat memiliki beberapa peran dasar yaitu:

1) Analis Masalah. Pendamping harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis dan identifikasi masalah, dan merumuskan kegiatan baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama masyarakat yang didampingi.
2) Pembimbing Kelompok. Pendamping melakukan bimbingan dan memberi masukan yang dibutuhkan kelompok, memberikan berbagai masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh kelompok dalam menghadapi masalah. Setiap keputusan diserahkan kepada kelompok sendiri.
3) Pelatih. Sebagai pendamping, dia harus bisa menularkan ilmu, pengetahuan dan pengalamannya kepada khalayak atau kelompok. Diperlukan pelatihan manajerial, kepemimpinan, dan teknis sambil bekerja dan kalau perlu studi banding ke daerah lain.
4) Inovator. Idealnya pendamping berperan juga sebagai inovator menemukan temuan-temuan sederhana untuk dijadikan sebagai input pengembangan masyarakat. Bentuknya antara lain bisa dalam hal inovasi model pembinaan kelompok, metode penyuluhan, manajemen administrasi yang berbasis pada kearifan lokal.
5) Penghubung. Karena permasalahan yang dihadapi masyarakat berskala multidimensi maka pendamping perlu menjadi penghubung. Maksudnya dia membuka akses kepada para pihak terkait instansi lokal dan daerah serta para tokoh masyarakat. Tujuannya agar hambatan pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang terjadi dapat di atasi dengan baik.

Berdasarkan prinsip kerja dan tugas-tugasnya, maka agar supaya pendamping dapat berperan optimum maka dibutuhkan pengembangan mutu sumber daya manusianya. Seharusnya model dan tingkat pengembangan sumber daya manusia pendamping bergantung pada jenis pendampingan, peran pendamping, tingkat pendidikan, dan pengalaman pendamping dalam pendampingan. Namun dalam artikel ini disajikan model yang bersifat umum yang utamanya meliputi:

(1) Pelatihan Dasar Metode *Participatory Rural Appraisal*
(2) Pelatihan Dasar Pengembangan Masyarakat
(3) Pelatihan kepemimpinan dan manajemen
(4) Pelatihan dasar analisis sosial dan perumusan program
(5) Pelatihan tentang tugas-tugas pendamping sebagai fasilitator
(6) Pelatihan kerja dalam kelompok
(7) Pelatihan tentang peraturan dan kebijakan pembangunan
(8) Pelatihan dasar-dasar teknis produksi dan pemasaran hasil.

Proses pelatihan dilaksanakan dengan model partisipatif. Pendekatannya menggunakan model belajar untuk Pendidikan Orang Dewasa (POD). Intinya adalah dengan pendekatan andragogi yaitu sistem belajar umpan-balik bagi peserta sehingga mampu menguasai, memahami materi latihan dengan tahapan (1) mengalami; (2) mengungkapkan; (3) menganalisis; (4) menemukan prinsip; (5) menerapkan prinsip. Oleh karena itu dalam proses pelatihan diperlukan sejumlah metode/ teknik maupun media seperti curah gagasan, diskusi, simulasi, studi kasus, maupun praktek lapang.

Adapun tahapan pelaksanaan pelatihan partisipatif adalah: (a) Pengorganisasian kelas. Peserta disatukan dalam satu kelas besar yang kemudian selama proses akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil; (b) Penyampaian

materi pelatihan sesuai alur dan kurikulum yang sudah dipersiapkan; (c) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang merupakan pembulatan dari keseluruhan materi pelatihan dan layak dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang akan pendamping lakukan; dan (d) Evaluasi seluruh proses pelatihan oleh pendamping yang berguna untuk pembelajaran mereka dalam kegiatan pelatihan berikutnya.

Selain dalam bentuk pelatihan maka diperlukan cara pengembangan mutu SDM pendamping dengan membentuk forum pendampingan. Pendamping bertugas untuk memfasilitasinya. Tujuan dan lingkup kegiatannya meliputi (1) pengembangan sinergitas dalam mencari solusi atas permasalahan pendampingan yang bersifat lintas sektoral; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan masyarakat, misalnya tentang peningkatan mutu kohesi sosial, produksi dan pemasaran; (3) mengembangkan kemampuan akses kelompok masyarakat terhadap sumber daya produktif dan kemitraan dengan pihak ketiga; dan (4) meningkatkan kemampuan dan kapasitas pendamping dengan tukar-menukar pengalaman dalam pendampingan.

KESIMPULAN

1. Derajat kesejahteraan rakyat Indonesia dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia membuktikan proses pengembangan masyarakat harus tetap dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan berbasis kearifan lokal.
2. Unsur terpenting dalam capaian keberhasilan pengembangan masyarakat di samping unsur modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia adalah unsur modal sosial seperti saling percaya sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial dan kerjasama kolektif.
3. Penguatan modal sosial meliputi pendidikan agama, sosialisasi keluarga, pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial, sosialisasi dan internalisasi pentingnya modal sosial, pengembangan komunikasi informasi, dan mengakomodasi informasi melalui proses penyaringan kemanfaatannya.
4. Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat membutuhkan pendamping yang berfungsi sebagai analis masalah, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, dan penghubung. Prinsip bekerjanya adalah (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya dan (6) prinsip pembelajaran bersinambung.
5. Agar supaya pendamping dapat berperan optimum maka dibutuhkan pengembangan mutu sumber daya manusianya melalui pelatihan partisipatif berbasis pendidikan orang dewasa yang terdiri dari Metode *Participatory Rural Appraisal*, pengembangan masyarakat, kepemimpinan dan manajemen, analisis sosial dan perumusan program, kerja dalam kelompok, tugas-tugas pendamping sebagai pemfasilitasi, peraturan dan kebijakan pembangunan, dan teknis produksi dan pemasaran hasil.
6. Proses pelatihan dilaksanakan dengan model partisipatif. Pendekatannya menggunakan model belajar untuk Pendidikan Orang Dewasa (POD). Intinya adalah dengan pendekatan andragogi yaitu sistem belajar umpan-balik bagi peserta sehingga mampu menguasai, memahami materi latihan. Evaluasi seluruh proses pelatihan oleh pendamping yang berguna untuk pembelajaran mereka dalam kegiatan pelatihan berikutnya.

7. Selain dalam bentuk pelatihan maka diperlukan cara pengembangan mutu SDM pendamping dengan membentuk forum pendampingan. Tujuannya membangun sinergitas antarpelaku pengembangan masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat, pengembangan akses kebutuhan pengembangan masyarakat dan peningkatan kemampuan dan kapasitas pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

Akdere M. 2005. Social Capital Theory and Implications for Human Resource Development. *Singapore Mangement Review*.

AMA. 1993. *Local Authorities and Community Development: A Strategic Opportunity for the 1990s*. London: Association of Metropolitan Authorities.

Ancok D. 2007. Modal sosial dan kualitas masyarakat. UGM.

Barker GR. 1997. "Social Capital and Policy Development" *dalam* David Robinson, *Social Capital and Policy Development*. Wellington: Institute of Policy Studies.

Coleman JS. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology,* Supplement S95-S120.

Cunningham I. 2002. Developing Human and Social Capital in Organizations. *Industrialand Commercial Training.*

Fukuyama F. 1996 *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity.* Penguin: Harmondsworth.

Haq MUI. 1995. *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.

Mangkuprawira S, Hubeis AV. 2007. *Manajemen Mutu SDM*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Pierre B. 1986. *The Forms of Capital* .

Putnam R, Leonardi R, Nanetti R. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.* Princeton: Princeton University Press.

Putnam RD. 1993. The prosperous community: Social capital and economic growth, Current.

Putnam RD. 2006. *E Pluribus Unim: Diversity and Community in the Twenty-First Century,* Nordic Political Science Association.

Schuller T. 2000. 'Social and Human Capital: The Search for AppropriateTechnomethodology'. *Policy Studies.*

Thomas C. 2000. *Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality*. London: Pluto Press.

PARADIGMA PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI MENYONGSONG MASYARAKAT GLOBAL

Kudang B. Seminar[3]

ABSTRACT

In this global era, information technology (IT) has been aggressively developed and utilized for enhancing the various and dynamic needs of human beings in this world. This technology provides a new paradigm to individuals, groups, organizations, or business entities to interact, communicate, promote, share, invite, and cooperate to each other electronically without space and time borders. However, the vital opportunity provided by IT must be smartly and wisely responded by humans or organizations to achieve the best platform of implementation and utilization of IT to face the great challenge of globalization and competitiveness. The main mission of humans is to introduce world- wide prosperity, safety and sustainability for well beings. Therefore, the new paradigm for utilizing information technology must focus on and comply with three pillars: (1) vision and mission of humans as the manager of earth, (2) the vision and mission of humans' welfare & prosperity, and (3) vision and mission of enterprise/organization for running excellent business processes. This paper discusses various opportunities and strategies for utilizing information technologies for achieving the best performance and benefit to cope with global societies and challenges.

Key words: *Information technology, web technology, global society, collaboration*

DEFINISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI

Teknologi informasi (TI) adalah teknologi elektronik untuk akuisisi, pengolahan, penyimpanan, produksi dan distribusi informasi (Gunton 1994). Tulang punggung TI adalah Sistem Komputer dan Sistem Telekomunikasi. TI adalah teknologi pendukung dari Sistem Informasi (SI), yaitu sistem berbasis TI yang mengelola sumber daya berupa *hardware*, *software*, *netware*, *dataware* dan *brainware* untuk melakukan transformasi data menjadi informasi (O'Brien 2007). Dengan demikian adanya TI belum menjamin keberadaan SI, namun keberadaan SI pasti didukung oleh keberadaan TI.

Perlu dipahami bahwa Sistem Informasi (SI) adalah industri informasi yang mengolah data (bahan mentah) menjadi informasi (Gambar 1). Kualitas produk berupa informasi menjadi ukuran akan keberhasilan dari suatu industri informasi. Jika kualitas informasinya prima, berarti industri atau sistem informasinya prima.

PERAN SI DAN TI BAGI INDIVIDU DAN ORGANISASI

Teknologi informasi dewasa ini merupakan kebutuhan vital manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya. Kemajuan yang agresif dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memungkinkan manusia untuk melakukan proses komunikasi informasi secara lebih cepat dan akurat dalam menghadapi globalisasi.

Teknologi web dan multimedia yang merupakan bagian dari teknologi informasi dan komunikasi visual sangat efektif dan efisien menjelaskan secara kongkrit dan alami apa yang belum pernah dilihat dan didengar oleh pengguna informasi. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi visual tersebut, kita mampu mengurangi permasalahan dalam berkomunikasi dan penyampaian informasi.

[3] Direktur Komunikasi dan Sistem Informasi IPB

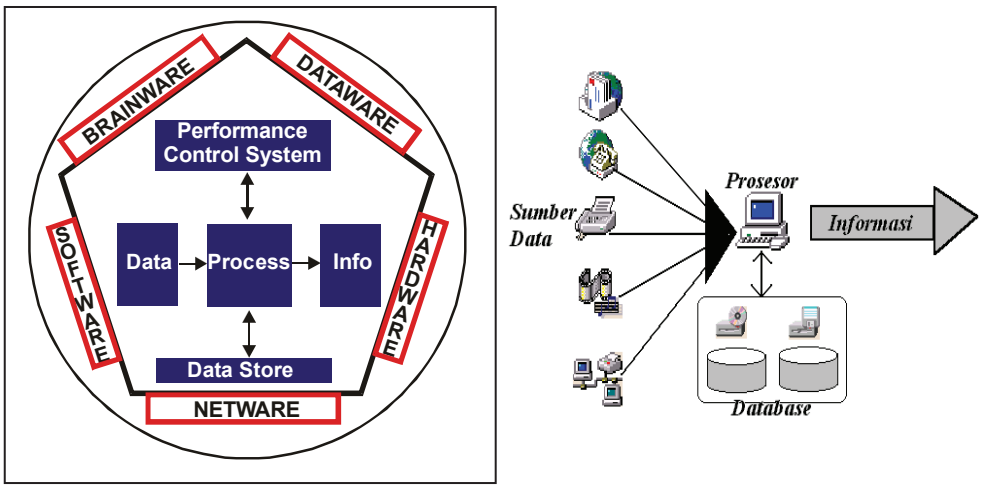

Gambar 1 Sistem informasi dan dan rantai produksi informasi

Perkembangan teknologi web dan multimedia di Indonesia merambah dengan pesat ke berbagai bidang dan banyak merubah kebiasaan bahkan paradigma hidup kita dalam berinteraksi, berpromosi, berkolaborasi, berorganisasi dan berekreasi. Banyaknya teknologi pendukung situs komunitas seperti *Yahoo Mesenger (YM), Flickr, Facebook* dan *Twitter* telah membuka peluang baru bagi generasi ke depan menyongsong interaksi komunitas global tanpa batas ruang dan waktu (Gambar 2). Jika kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan cerdas dan bijak, berbagai kemanfaatan individu maupun kolektif akan lebih terbuka untuk dimanfaatkan, dipertukarkan dan dipropagandakan di alam semesta ini.

Gambar 2 Teknologi informasi memungkinkan interaksi global tanpa batas ruang dan waktu

Dari sisi lingkungan sosio-teknologi (Gambar 3), SI adalah salah satu faktor kritis yang mempengaruhi kinerja proses bisnis dari suatu *enterprise* (organisasi). Persaingan yang sangat kompetitif di era global saat ini menuntut kinerja prima yang kompetitif, sehingga suka atau tidak suka, cepat atau lambat, SI akan mempengaruhi setiap organisasi dalam memenangkan kompetisi yang terus menajam. Bahkan SI menjadi bagian dari solusi untuk mencapai keuntungan strategis (strategic advantage) suatu *enterprise*/organisasi.

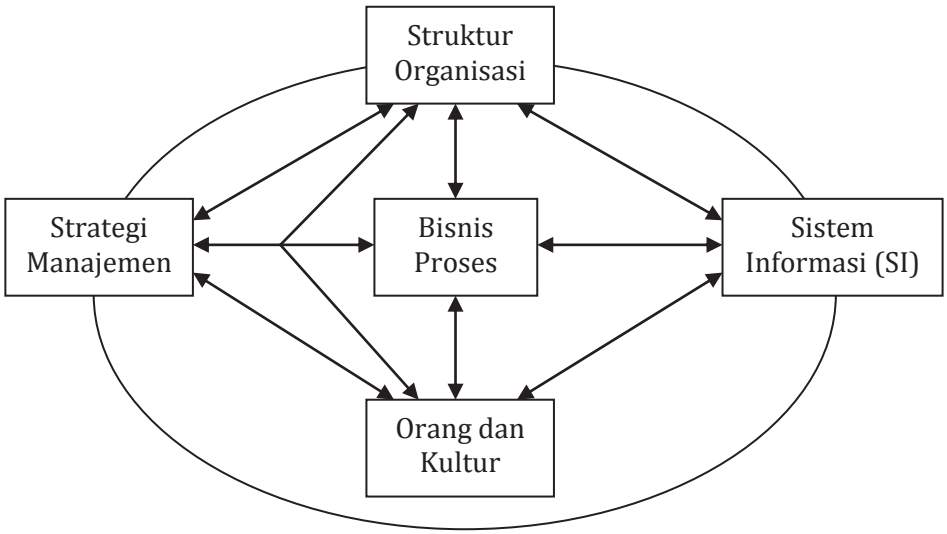

Gambar 3 Sistem informasi dalam sebuah lingkungan sosio-teknologi (O'Brien 2007)

Mengutip pendapat Michael Hammer dan James Champy tentang peran TI/SI bagi organisasi: "*company that cannot change the way it thinks about Information Technology cannot re-engineer,*" menunjukkan betapa vitalnya peran TI dalam melakukan transformasi proses bisnis menuju keunggulan kompetitif. Namun demikian peran TI ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus melalui suatu proses rekayasa (engineering) atau rekayasa ulang (re-engineering) yang beorientasi pada *rasionalisme* dan *utilisasi* TI (Gambar 4).

Falsafah mendasar dari pendayagunaan TI bagi *enterprise* seyogyanya berpijak pada esensi dan fungsi dari teknologi: "*Technology is the technical means people use to improve their surroundings. It is also knowledge of using tools and machines to do tasks efficiently. "*(www.bergen.org/technology/defin.html). Jadi teknologi terkait erat dengan teknik/rekayasa (engineering). Mengacu pada Encyclopedia Britannica (1974), *engineering* berasal dari kata *ingenerare* yang artinya *menciptakan* (to create); sedangkan definisi umum *engineering* adalah: "*professional art of applying science to the optimum conversion of the resources of nature to the benefit of man*."

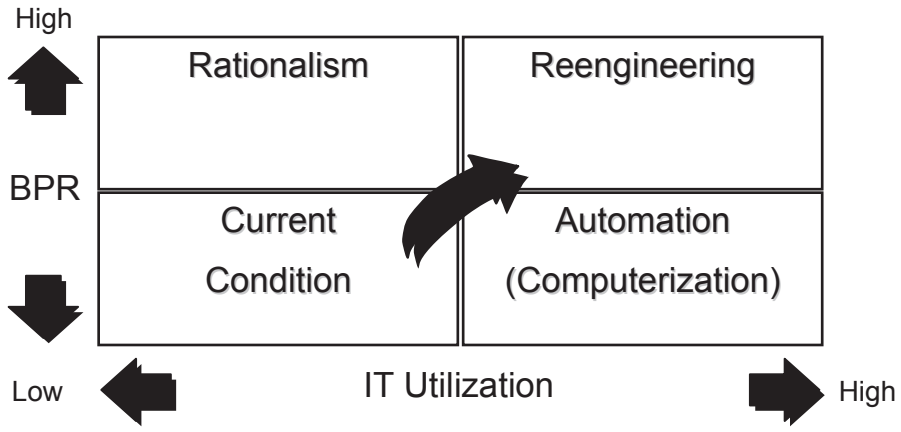

Gambar 4 Dimensi *re-engineering*

Hasil dari *re-engineering* adalah suatu pembaharuan proses binis yang mendayagunakan TI secara rasional yang memungkinkan *enterprise*/organisasi untuk berkembang tidak saja secara kuantitatif (physical) namun juga secara kualitatif (values). Nilai (values) mencakup antara lain kemudahan, kecepatan, keakurasian, kecerdasan, efisiensi, produktivitas dan efektivitas. Hal ini sesuai dengan salah satu moto TI: "*Not the big defeats the small, but the fast defeats the slow*" (bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang cepat mengalahkan yang lambat).

PARADIGMA BARU PENDAYAGUNAAN TI

Paradigma adalah kerangka mental dari suatu acuan yang mendominasi cara orang berpikir dan bertindak (Karl Albrech). Acuan (referensi) yang digunakan dalam membentuk kerangka mental untuk berpikir dan bertindak menjadi vital di era global yang kompetitif ini. Masalahnya adalah jika pendayagunaan TI berkontradiksi dengan tujuan dan norma-norma holistik dan pragmatik universal, maka pendayagunaan TI dapat mengarah kepada penghancuran kehidupan yang dahsyat (cacastrophy) secara sistematis.

Butir-butir acuan dalam pendayagunaan TI haruslah mencakup ketiga hal dari prioritas tertinggi ke rendah:

1. Visi dan misi manusia sebagai makhluk pengelola bumi (vicegerant/khalifah)
2. Visi dan misi kesejahteraan umat manusia (human welfare & prosperity) secara universal
3. Visi dan misi *enterprise*/organisasi sebagai pengelola proses bisnis.

Visi dan misi manusia sebagai makhluk pengelola bumi (vicegerant/khalifah)

Acuan ini memiliki prioritas tertinggi dalam pardigma baru pendayagunaan TI, karena setiap diri manusia ini telah ditetapkan sebagai pengelola bumi oleh Pencipta (Kholiq) yang akan diminta pertanggungan jawabnya.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (Al-Baqarah [2]:30).

Allah Yang Maha Berkehendak dan Maha Berkuasa, mendeklarasikan bahwa sesungguhnya DIA akan menciptakan *khalifah* (pengelola) di muka bumi. Sebagai pengelola bumi manusia diberikan ilmu dan kepercayaan (amanah) agar dapat mengatur, memanfaatkan, dan merawat bumi ini dengan optimal agar banyak memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang banyak (bahkan lingkungan alamnya) untuk kebaikan di dunia maupun di akherat.

Manusia tidak diciptakan sebagai budak dan tidak memperbudak manusia lain. Terlebih lagi manusia tidak boleh pernah menjadi budak teknologi. Teknologi adalah alat bantu (tools) pengelola yaitu manusia; justru manusia yang seharusnya memperbudak teknologi untuk berupaya dan berlomba menjadi pengelola yang berkinerja tinggi sesuai dengan aturan main dari Pencipta-nya.

Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). (Al-Baqarah [2]:148).

Mensinergikan visi dan misi manusia dan definisi TI seperti dibahas pada bagian awal tulisan ini, maka setiap diri perlu berlaku cerdas secara intelektual maupun emosional dalam mendayagunakan TI. Dengan TI manusia dapat memanfaatkan/merekam fakta/observasi (data) yang faktual dan sahih untuk diolah menjadi informasi (information) yang bermanfaat. Selanjutnya informasi diolah menjadi pengetahuan (knowledge) untuk mengambil keputusan terbaik yang tetap dipagari dengan arif (intelectually & emotionaly).

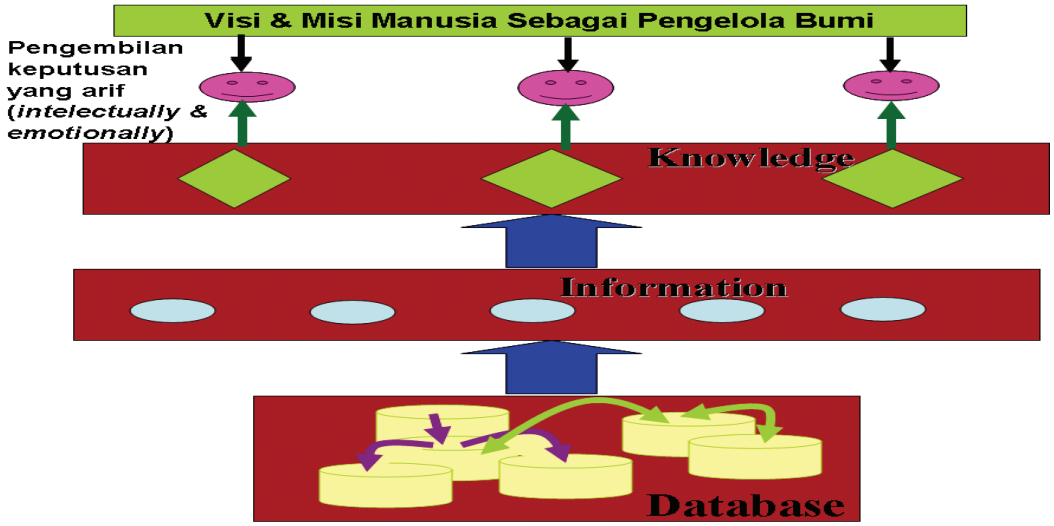

Gambar 5 Pemanfaatan teknologi informasi untuk berbuat cerdas dan arif

Kecenderungan terkini pendayagunaan TI mengarah kepada pembangkitan pengetahuan dan kebijaksanaan (wisdom) menurut Davenport (1998).

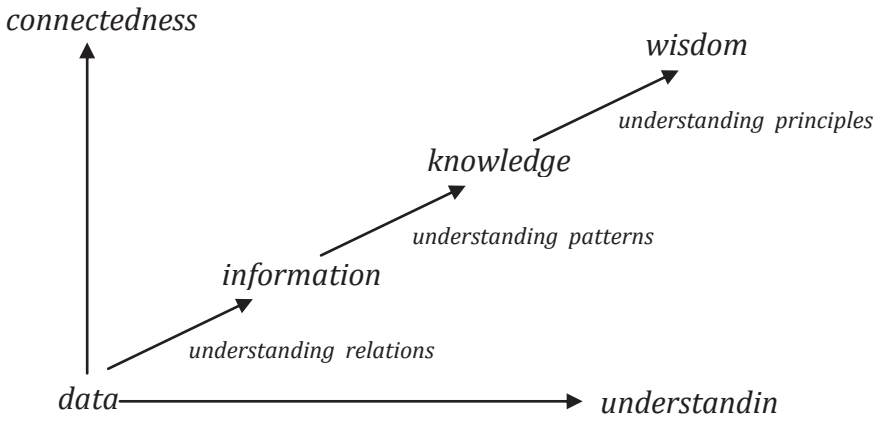

Gambar 6 Hirarki *Data-Information-Knowledge-Wisdom* (DIKW)

Visi dan misi kesejahteraan umat manusia (human welfare & prosperity) secara universal

Acuan ini menempati prioritas ke dua yaitu menempatkan visi kolektif manusia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan bersinergi mewujudkan kesejahteraan universal yang berkelanjutan.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal (berinteraksi, berkolaborasi, dan bersinergi) (Al-Hujurat [49]:13).

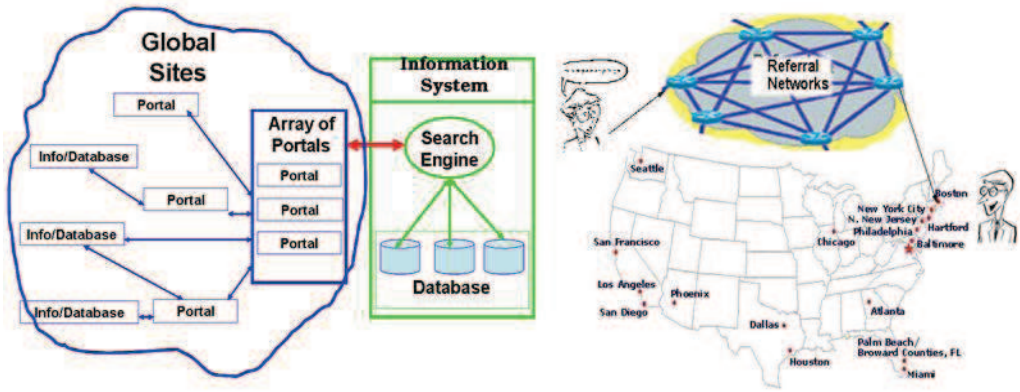

Gambar 7 Teknologi *web, search engine* dan portal untuk kolaborasi universal

Manusia yang tersebar secara geografis di bumi yang luas ini diperintah untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, bersinergi dengan mendayagunakan TI guna meminimkan kendala geografis dan memaksimalkan kemanfaatan kolektif

(mutual benefit) antar suku dan bangsa kesejahteraan yang berkelanjutan. Teknologi web, mesin pencarian (search engine*)* dan portal (Gambar 7) memungkinkan kolaborasi universal.

Berikhtiar dan berbuat untuk kemaslahatan kolektif umat manusia dengan mendayagunakan anugerah Sang Pencipta berupa teknologi merupakan perbuatan terpuji dan bermartabat. Jangan sampai terjadi sebaliknya, dimana suatu bangsa justru menjajah dan menindas bangsa lain dengan pendayagunaan TI karena terpedaya oleh kecanggihan dan kemudahan yang diperolehnya dari teknologi tersebut. Jika ini terjadi manusia telah kehilangan fungsi khalifah (pengelola) karena justru menjadi budak nafsu dari teknologi.

Visi dan misi *enterprise*/organisasi sebagai pengelola proses bisnis.

Jika kita perhatikan dengan seksama kecenderungan perkembangan bisnis saat ini mengarah pada *IT-based internetworking* untuk mewujudkan *internetworked enterprises* baik dalam pola *business-to-bussiness* (B-2-B), *business to customers* (B-2-C), *business-to-government* (B-2-G), *government-to-government* (G-2-G), *government-to-citizents* (G-2-C). *IT-based internetworking* merupakan bentuk hubungan, kerjasama atau kemitraan yang mendayagunakan TI (teknologi informasi) berbasis jaringan (internet, intranet, ekstranet).

Lahirnya *virtual-company (VC*) yaitu organisasi yang menggunakan TI untuk menghubungkan orang, aset dan ide dari berbagai sumber, merupakan wujud konkrit dalam pendayagunaan TI untuk pengelolaan bisnis *multi-enterprise*, *multi-disciplin* dan *multi-culture*. Karakteristik utama dari VC adalah adaptabilitas, peluang (opportunity), keunggulan, teknologi, tanpa-batas ruang dan waktu, serta kepercayaan. Saat ini perwujudan VC didominasi oleh *e-commerce*.

Sebagai ilustrasi ketika *customer* masuk ke situs *amazon.com* untuk mencari dan membeli buku dari berbagai *publishers* internasional, esensinya kita telah masuk dalam suatu *IT-based internetworking* yang menyatukan bisnis *publishers* buku internasional, *customer* (perguruan tinggi, lembaga riset, industri barang dan jasa) dan mitra (banking) dalam suatu transaksi proses bisnis virtual (elektronik) tanpa kendala ruang dan waktu dengan memanfaatkan TI atas dasar kepercayaan (trust-based) dengan berbagai keunggulan seperti kemudahan, kecepatan, penghematan dan keleluasaan.

Virtual Company (VC) dan *IT-based internetworking* telah melahirkan paradigma baru pengelolaan TI yang berorientasi global (Gambar 6) untuk mendukung *global company* (GB). GB adalah bisnis yang dipandu dengan strategi global yang memungkinkan untuk merencanakan dan melaksanakan semua aktivitas bisnisnya dalam konteks sistem dunia (whole-world system), sehingga dapat melayani *customer* lokal maupun global dengan keunggulan prima.

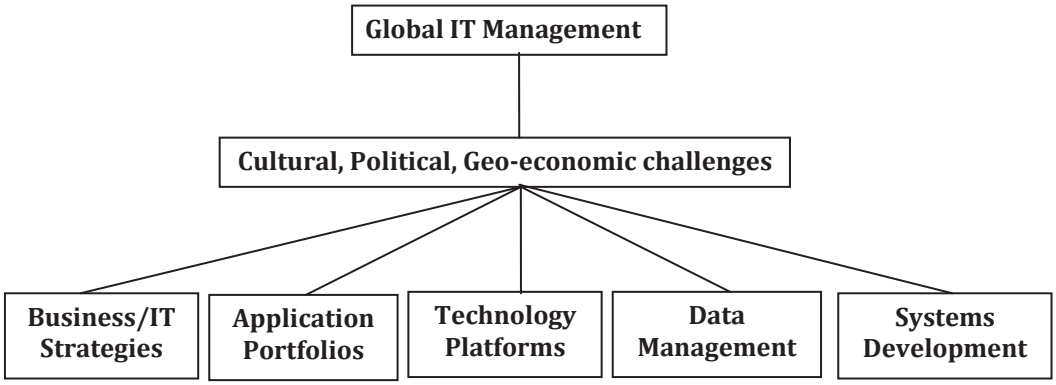

Gambar 8 Management TI berorientasi global

KESIMPULAN

Paradigma baru pendayagunaan teknologi informasi (TI) haruslah mengedapankan visi dan misi manusia sebagai pengelola cerdas secara intelektual dan emosional, visi dan misi kesejahteraan umat secera kolektif dan berkelanjutan, serta visi dan misi *enterprise*/organisasi dalam mengelola proses-bisnis untuk melakukan berbagai kemanfaatan dan kesejahteraan yang maksimal bagi lingkungan universal (global) yang bermartabat dan terpuji.

Dengan paradigma tersebut perencanaan, pembangunan dan pengembangan TI dan SI harus memiliki tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur bagi individu maupun organisasi (enterprise), sehingga tidak boros, kontraproduktif, dan salah sasaran. Pelayanan masyarakat (customer) yang prima dengan berbagai dinamika kultur, budaya, perkembangan teknologi dan tuntutan global menjadi peluang, tantangan dan sekaligus target pendayagunaan TI dan SI di masa mendatang.

Semua hal di atas tetap memposisikan manusia sebagai pengelola cerdas bumi dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu (tools or servants) untuk berkinerja prima dengan ketaatan (ketaqwaan) kepada Pencipta-Nya.

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (*taat) *di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal* (Al-Hujurat [49]:13).

DAFTAR PUSTAKA

Davenport TH, Prusak L. 1998. "*Working Knowledge.*" Harvad: Harvad Business School Press.

Gunton. 1993. *A Dictionary of Information System & Computer Science.* New York: McGraw-Hill.

O'Brien J. 2007. *Enterprise Information System*. 13th Eds. New York: McGraw-Hill.

PERANAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Musa Hubeis[4]

ABSTRACT

System of government in Indonesia that has been changed from centralized (top-down) to decentralized (bottom-up) or autonomous regions (Regional Autonomy) is marked based on the Law No. 22/1999 on Regional Government, which was revised by Law No. 32/2004 and supported by Law No. 25/2004 (a combination of top-down and bottom-up approaches). In this case, policy makers as professionals have an important role in the development effectively, namely the Supervision and Control. Policy regarding institutional arrangements (policy level) and the limits of autonomy in collective decision-making process in accordance with the strata in Indonesia, according to the policy level, the title and its implementation, involves a variety of development actors (ABG-C: Academician, Business, Government and Community). Policies in community development is the crystallization of the design community needs that cannot be separated from the matters that empower and restrict it from the pressures of ideological/cultural and structural, as well as active involvement of communities in the process of day-to-day policy.

Key words: *law, policy, community, autonomy, top-down, bottom-up*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia yang sentralistik (top-down) menjadi desentralistik (bottom-up) atau dikenal sebagai otonomi daerah (Otda) yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) ditandai dengan keluarnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi oleh UU No. 32/2004. Perubahan tersebut berimplikasi pada sistem perencanaan pembangunan, sebagai akibat dari kewenangan yang lebih luas pada daerah, karena mengurus dan mengatur seluruh urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah, sehingga muncul perbedaan tuntutan dari masyarakat maupun pemda. Oleh sebab itu, dikeluarkan UU No. 25/2004, yang dalam pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) dengan lebih menekankan cara-cara aspiratif (sisi pasokan dan permintaan) dan partisipatif dari masyarakat, di samping memahami dinamika masyarakat dan pemerintah daerah beserta interaksinya dengan pemerintah pusat (Syamsuddin *et al.* 2007).

Dari hal yang dikemukakan di atas, terlihat semakin dekatnya proses pengambilan kebijakan (tujuan, nilai-nilai dan program) sebagai alat manajemen (aturan-aturan dalam pencapaian tujuan) dengan masyarakat dan semakin besarnya partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan, terutama pengembangan masyarakat itu sendiri. Namun demikian perlu dilihat sampai sejauh mana masyarakat peduli dan mempunyai rasa memiliki atas kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan rasa keadilan dan pemerataan pembangunan di wilayah dimana masyarakat itu berada. Sebagai ilustrasi, kebijakan yang dilakukan sebagai akibat dorongan arus globalisasi dan perdagangan bebas telah menimbulkan perubahan-

[4] Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen FEM IPB, Wing Rektorat Lt 3 IPB Dramaga; Ketua Program Industri Kecil Menengah, SPs IPB dan Ketua Lembaga Pendamping, LPPM IPB.

perubahan, tetapi tidak diikuti dengan perubahan mendasar di tingkat kebijakan nasional, yaitu strategi pertumbuhan ekonomi tinggi dimana sektor pertanian ditempatkan sebagai penyangga dalam membangun industri berspektrum luas. Implikasi dari kebijakan tersebut (misal, fungsi pelayanan), pemerintah dengan segala upaya meningkatkan produksi beras guna tercapainya swasembada yang diiringi dengan mekanisme kontrol harga beras demi melancarkan industrialisasi di perkotaan, sehingga buruh-buruh industri dapat menikmati beras murah dan di sisi lain petani sebagai pelaku paling berjasa dalam produksi beras tersebut terperangkap kebijakan beras murah, sehingga tingkat kesejahteraannya tidak seimbang dengan masyarakat perkotaan.

Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh kegiatan program yang dirancang dan pembiayaan yang cukup, di samping isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya dalam mengolah dan meningkatkan pembangunan. Dalam hal ini perlu diperhatikan peran pemda atau pemerintah pusat yang optimal sebagai pengambil kebijakan, kejelasan peraturan yang dibuat, kesamaan persepsi, pemenuhan aspirasi masyarakat bawah, keteladanan dan kepemimpinan dalam memahami apa yang senyatanya terjadi, baik secara administratif maupun dampaknya bagi masyarakat.

PERANAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

Pengambil Kebijakan memiliki peran utama dan penting dalam pengembangan masyarakat, terutama dalam menjembatani pemecahan masalah dan memandu implementasi strategi (Hubeis dan Najib 2008), yaitu menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk mengejar pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan kebijakan memerlukan tahapan berikut: (1) diskusi antar instansi pemda atau pemerintah pusat dengan berbagai komponen masyarakat yang difasilitasi oleh suatu tim ahli; (2) hasil pada butir (1) dapat dijadikan rumusan arah kebijakan umum dan program pembangunan yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan; (3) penjabaran butir (2) ke dalam rencana kerja pemda atau pemerintah pusat melalui forum antar instansi terkait maupun pihak berkepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan berupa sosialisasi dan sinkronisasi program, serta aspirasi masyarakat, yang nantinya dapat dijadikan acuan pemda atau pemerintah pusat dalam menetapkan rencana-rencana pembangunan (prioritas, fokus dan manfaat); (4) penyusunan laporan hasil dari butir (3) atau dokumen akhir dari pelaksanaan pembangunan.

Tenaga profesional yang benar-benar ahli dalam bidangnya amat dibutuhkan, baik dalam arti umum maupun tertentu melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) atau mengikuti program/pengalaman secara khusus dalam pekerjaan/bidang tertentu yang mampu berpikir kreatif, inovatif, mandiri dan dapat membangun dirinya dan masyarakat sehingga produktif. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya aparatur (termasuk pengambil kebijakan) harus memiliki atribut profesionalisme (Tjokrowinoto *et al.* 1996) berikut:

1. Keterampilan dan keahlian teoritis ilmiah tertentu yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuninya.
2. Mampu menyumbangkan ilmu dan tenaganya secara optimal untuk kelancaran usaha di tempat kerjanya.
3. Dapat mendorong peningkatan produktivitas berkelanjutan.

4. Sikap untuk terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan keahlian dan keterampilannya.
5. Disiplin dan patuh pada aturan main profesi dan tempat kerjanya.
6. Kesiapan untuk berubah atau melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tengah berlangsung atau bahkan menciptakan perubahan.

Pengambil Kebijakan di dalam menjalankan tugasnya, melakukan fungsi utama seperti Pengawasan dan Pengendalian. Pengawasan di sini merupakan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi dari *policy* pihak luar, dalam rangka menghindari penyimpangan dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Sedangkan Pengendalian dianggap sebagai internal kontrol berupa standar maupun bandingan untuk menjamin strategi dari pemenuhan masukan dan produk yang didukung oleh tingkat kesiapan sistem dan struktur.

Pengawasan dalam konteks masyarakat (Cahyat & Wibowo 2005) dapat ditinjau dari aspek kenegaraan, yaitu hak melakukan pengawasan sebagai ciri dari negara demokrasi; dan manajemen, yaitu pemberian layanan harus memperhatikan aspirasi pengguna/pelanggan (konstituen). Dengan menyertakan masyarakat sebagai pengawas, dapat dikurangi potensi kegagalan pembangunan dan untuk mencapai efektivitasnya diperlukan: (1) terbukanya pintu pengawasan melalui sistem (hak untuk mengawasi, hak atas informasi, hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara, serta hak perlindungan sebagai saksi) dan struktur/jalur (jalur pemerintahan dan non pemerintahan); (2) kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan, baik kasuistis oleh perorangan atau kelompok, pengawasan keuangan (penyimpangan dalam pembelanjaan), prosedur kerja dan kebijakan pemerintahan.

Untuk melakukan pengawasan yang baik oleh masyarakat, menurut Cahyat dan Wibowo (2005) diperlukan keterampilan seperti strategi komunikasi dan komunikasi efektif, pengumpulan data dan investigasi, analisis data dan informasi, serta penguatan kelembagaan kelompok. Hal tersebut diikuti dengan adanya permintaan pemerintah agar masyarakat ikut mengawasi, adanya papan pengumuman dan ketersediaan media yang dapat diakses (misalnya *open house*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya terlihat sebagai mekanisme semata (masalah teknis dan manajerial) dalam menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan, tetapi juga melibatkan faktor sumber daya hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai dengan golongan politik tertentu yang mungkin tidak setuju terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.

KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Kebijakan (pedoman umum) merupakan bagian dari Rencana Strategik (Renstra) yang berperan dalam pencapaian hal yang dituju sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan (pengambilan keputusan) menurut kegiatan dan pengalokasian sumber daya tersedia. Dalam konteks pengembangan masyarakat, kebijakan terkait dengan strategi pewilayahan pembangunan (klaster) dan urusan pemerintahan. Menurut Kartasasmita (1996), kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, yaitu apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya, apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut (tujuan dan

sasaran dari program, misal penanggulangan kemiskinan pada masyarakat pedesaan).

Dalam konteks pemerintahan, kebijakan menyangkut konsep (Bromley, 1989): (1) *institutional arrangement* (policy level) yang bersifat mengendalikan atau memberikan keleluasaan terhadap tindakan pada tingkat operasional; (2) batas-batas otonomi di dalam proses pengambilan keputusan (assessment) yang bersifat kolektif. Sebagai ilustrasi, strata kebijakan di Indonesia sesuai dengan tingkatan, sebutan dan bentuk dapat dilihat pada Tabel 1. Kebijakan tersebut dinilai bermanfaat, bila semua pihak terkait, terutama masyarakat merasakan manfaatnya dan bilamana ada masalah dalam pelaksanaannya, maka dianggap sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Kebijakan yang diimplementasikan erat kaitannya dengan hal seperti peningkatan akses dan perluasan kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi kegiatan, peningkatan efisiensi pendayagunaan sumber daya, dan sejenisnya. Hal tersebut diikuti dengan strategi pelaksanaan seperti meningkatkan dan memperkuat program-program esensial yang telah ada, atau yang kurang esensial dikaji ulang dan dimobilisasi sumber dayanya, memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi, mengupayakan penanganan secara efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau, dan melibatkan partisipasi semua kekuatan masyarakat. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk melakukan analisis yang lebih cermat terhadap kebutuhan masyarakat dan mencari masukan/ide untuk solusinya dari masyarakat itu sendiri (misal, pilihan model organisasi), keterlibatan perwakilan masyarakat dalam diskusi awal dan pada tahap pemantauan (misal, penetapan kerangka kerjasama), serta memperkuat landasan legalitasnya (bentuk-bentuk kontrak).

Tabel 1 Strata kebijakan di Indonesia

No.	Tingkat Kebijakan	Sebutan Kebijakan	Bentuk Kebijakan
1	Nasional	Umum	TAP MPR, UU
2	Pusat	Sektoral Teknis Pelaksanaan	UU, Perpu, PP Kepres, Inpres, Permen Kepmen, Inmen
3	Daerah	Umum Teknis/Pelaksanaan	Perda Kep Kepala Daerah, Kep DPRD
4	Lokal	Umum Teknis	Peraturan Desa Kep Kepala Desa

Efektivitas kebijakan dalam pengembangan masyarakat ditentukan oleh persyaratan berikut: keinginan politik, seluruh sistem perencanaan hingga evaluasi terpadu baik, tata kelola yang baik, kepemimpinan efektif dalam mengelola pembangunan, tidak adanya ego sektoral dan ego tingkatan pemerintahan (pusat versus daerah), pembagian peran yang jelas dan adil dalam pelaku pembangunan (ABG-C: Academician, Business, Government dan Community), serta pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dan adil antara sektor-sektor teknis pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, serta manfaat yang diperoleh suatu

pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu. Sebaliknya, masyarakat enggan atau tidak mau berpartisipasi (bentuk dan jenis) dalam kebijakan yang digulirkan Pengambil Kebijakan, bila: (1) kebijakan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang di-junjung tinggi oleh masyarakat, (2) kebijakan tersebut kurang mengikat, (3) ada ketidak-pastian hukum, (4) kebijakan terlalu ambisius dan ideal, atau tidak realistis (bersifat memaksa), (5) adanya pihak-pihak tertentu dengan sengaja tidak berpartisipasi atau mencari keuntungan dan (6) rumusan kebijakan tidak jelas dan mungkin satu dengan lainnya dari rumusan tersebut saling bertentangan.

Kebijakan dalam pengembangan masyarakat merupakan kristalisasi dari desain kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada faktor seperti ketepatan, efektivitas, efektivitas biaya dan efisiensi dari hal-hal yang memberdayakan dan membatasinya dari tekanan-tekanan ideologi/kultural dan struktural dari institusi yang menjalankan fungsi politik dan administratif secara rutin prosedural, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan sehari-hari. Hal tersebut secara skematis dapat disajikan dalam Gambar 1.

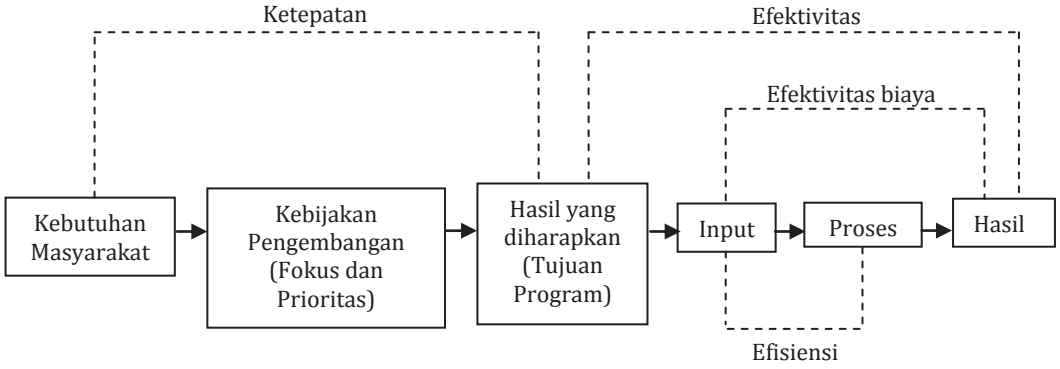

Gambar 1 Mekanisme kebijakan dalam pengembangan masyarakat

KESIMPULAN

Pengambil Kebijakan seyogyanya dapat menerjemahkan konsep pembangunan (visi dan misi) dalam berbagai kebijakan operasional yang memungkinkan peranserta dan kepedulian masyarakat sejak tahap perumusan sampai dengan pemanfaatan hasil program pengembangan masyarakat, dengan memperhatikan penguasaan kapasitas, kapabilitas, jumlah dan mutu, serta pola kepemimpinan.

Untuk membangun kemampuan masyarakat dalam memahami kebijakan, diperlukan adanya hubungan aksi kolektif masyarakat, baik langsung maupun melalui suatu organisasi dengan Pengambil Kebijakan dalam mencapai kepentingan bersama, serta perlunya melihat dukungan dari aksi kolektif di tingkat yang lebih tinggi, yakni koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, di samping peran pihak luar sebagai faktor pendorong.

Membangun kesadaran dan motivasi melalui proses pembelajaran, serta keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara komprehensif untuk menutup peluang pemborosan pada program-program kegiatan pengembangan masyarakat yang tidak produktif dari suatu implementasi

kebijakan dengan tujuan tertentu berdampak negatif dalam bentuk keputusan pemda atau pemerintah pusat untuk menghindari atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini erat kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pentingnya perluasan kapasitas dan distribusi, mengidentifikasi penyebab pemborosan dan upaya perbaikan efisiensi yang rendah, di samping isu-isu utama (misalnya bentuk organisasi dan kontrak yang dipilih) terkait dengan tujuan-tujuan yang menjadi prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

Bromley DW. 1989. *Economic Interest and Institution: The Conceptual Foundation of Public Policy*. New York: Basic Blackwell, Inc.

Cahyat dan Wibowo S. 2005. Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana agar dapat Efektif ? *Governance Brief*, Desember No. 23 : 1-6.

Hubeis M, Najib M. 2008. *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya saing Organisasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Kartasasmita G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

Syamsudin, Neldysavrino, Komarudin H, Siagian YL. 2007. Sudahkan Aspirasi Masyarakat Terakomodir dalam Rencana Pembangunan: Pelajaran dari Sebuah Aksi Kolektif di Jambi. *Governance Brief*, Juni No. 34(b): 1-3.

Tjokrowinoto M. 1996. *Birokrasi dalam Polemik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wibawa. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.

Rumusan Hasil Diskusi Makalah Panel Utama

Hasil diskusi panel utama adalah sebagai berikut:

- Komunikasi pembangunan di Indonesia harus sesuai dengan hakekat demokrasi yang berasaskan keterbukaan, tanggung gugat, kewirausahaan, profesionalisme, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan yang baik dan *good governance*.
- Modal sosial dan pengetahuan lokal merupakan aspek kunci dalam pengembangan masyarakat dan dalam pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
- Penyuluh atau fasilitator pemberdaya masyarakat adalah salahsatu aktor kunci komunikasi pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kualitas pendamping dengan standarisasi profesi penyuluh atau fasilitator pemberdaya masyarakat sebagai pendamping yang memadai dalam pembangunan berkelanjutan. Keterjaminan kompetensi tersebut hanya efektif bila didukung oleh asosiasi profesi terkait dan keberfungsian lembaga sertifikasi profesi yang relevan dan konsisten.
- Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia sehingga dalam pengembangan masyarakat harus berbasis pada teknologi informasi. Kemajuan yang agresif dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memungkinkan manusia untuk melakukan proses komunikasi informasi secara lebih cepat dan akurat dalam menghadapi era globalisasi.
- Efektivitas kebijakan dalam pengembangan masyarakat berkelanjutan dipengaruhi oleh kualitas program yang dirancang, pembiayaan yang cukup, isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya dalam pengembangan masyarakat.